



ANALISIS KONTEN DAN KOMPARATIF
GOOD CORPORATE GOVERNANCE REPORT &
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT
BERDASARKAN PEDOMAN UMUM GCG DAN STANDAR GRI G4

(Studi Kasus pada Laporan Tahunan dan *Sustainability Report*
Indo Tambangraya Megah dan Tambang Batubara Bukit Asam tahun 2013)

Disusun Oleh :

GLORIA PATRICIA RANTETODING

NIM. 115020307111020

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk meraih derajat Sarjana Ekonomi



Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya

Malang

2015

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kontribusi Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Good Corporate Governance.....	9
2.1.1 Definisi Good Corporate Governance.....	9
2.1.2 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance	10
2.1.3 Manfaat Penerapan Good Corporate Governance.....	13
2.2 Corporate Social Responsibility.....	14
2.2.1 Definisi Corporate Social Responsibility (CSR).....	14



2.2.2 Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR)	15
2.2.3 Definisi <i>Sustainability Reporting</i>	17
2.2.4 Global Reporting Initiative (GRI) G4	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Metode Penelitian	21
3.2 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	22
3.3 Instrumen Penelitian	22
3.4 Teknik Analisis Data	24
BAB IV PEMBAHASAN MASALAH	27
4.1 Profil Perusahaan	27
4.1.1 Indo Tambangraya Megah Tbk	27
4.1.1.1 Sejarah Indo Tambangraya Megah Tbk	27
4.1.1.2 Lokasi Indo Tambangraya Megah Tbk	27
4.1.1.3 Visi dan Misi Indo Tambangraya Megah Tbk	28
4.1.1.4 Nilai-nilai Indo Tambangraya Megah Tbk	28
4.1.1.5 Tujuan, Sasaran dan Strategi Umum Indo Tambangraya Megah Tbk	30
4.1.1.6 Anak Perusahaan Indo Tambangraya Megah Tbk	31
4.1.1.7 Komposisi Pemegang Saham Indo Tambangraya Megah Tbk	33
4.1.1.8 Struktur Organisasi Indo Tambangraya Megah Tbk	33



4.1.1.9 Sekilas Perkembangan Indo Tambangraya

Megah Tbk tahun 2013 34

4.1.2 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 35

4.1.2.1 Sejarah Tambang Batubara Bukit Asam Tbk..... 35

4.1.2.2 Lokasi Tambang Batubara Bukit Asam Tbk..... 36

4.1.2.3 Visi dan Misi Tambang Batubara Bukit

Asam Tbk..... 37

4.1.2.4 Nilai-nilai Tambang Batubara Bukit

Asam Tbk..... 37

4.1.2.5 Tujuan, Sasaran dan Strategi Umum Tambang

Batubara Bukit Asam Tbk 38

4.1.2.6 Anak Perusahaan Tambang Batubara Bukit

Asam Tbk..... 38

4.1.2.7 Komposisi Pemegang Saham Tambang

Batubara Bukit Asam Tbk 39

4.1.2.8 Struktur Organisasi Tambang Batubara Bukit

Asam Tbk 40

4.1.2.9 Sekilas Perkembangan Tambang Batubara

Bukit Asam Tbk tahun 2013 41

4.2 Penerapan Tata Kelola Perusahaan berdasarkan

Pedoman Komite Nasional Kebijakan Governance

(KNKG) tahun 2006 41

4.2.1 Indo Tambangraya Megah Tbk 42



Bab V PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan.....	92
5.1.1 Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> berdasarkan Pedoman GCG	92
5.1.2 Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> berdasarkan GRI G4	94
5.2 Keterbatasan Penelitian	96
5.3 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan yang sangat pesat pada arus informasi saat ini menyebabkan banyak perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Terlebih lagi di era globalisasi seperti sekarang, *stakeholder* atau pemangku kepentingan tidak semata-mata melihat dari kinerja keuangan perusahaan saja, melainkan apa yang bisa perusahaan berikan bagi lingkungan sekitar perusahaan tersebut berada.

Isu lingkungan kian menjadi erat kaitannya dengan perusahaan. Perusahaan mempunyai pengaruh penting dalam roda perekonomian. Perusahaan terus berkembang menyediakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Perusahaan hadir untuk menyerap tenaga kerja yang kemudian dapat mengambil peran dalam kesejahteraan manusia. Sungguh ironis karena dibalik hal-hal tersebut perusahaan turut menyumbang perusakan ekosistem lingkungan.

Perusakan ekosistem lingkungan sering terjadi selama proses produksi dan pasca proses produksi diantaranya pencemaran udara, air dan tanah. Perusakan lingkungan ini disebabkan semata-mata karena perusahaan yang selalu berorientasi pada keuntungan. Paham kapitalis yang banyak dianut perusahaan seringkali mengabaikan keseimbangan kehidupan yang terjadi di sekeliling perusahaan. Perusahaan saat ini tidak lagi diperhadapkan pada prinsip *single bottom line* yang dari hari ke hari terus mengejar keuntungan semata, melainkan

pada prinsip *triple bottom line* yang terdiri dari *profit, people, planet*. Prinsip ini kemudian yang menjadi pengingat perusahaan, untuk turut mengambil bagian dalam pemberdayaan dan peningkatan kualitas manusia dan juga pemeliharaan lingkungan.

Pada dasarnya, penerapan dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah bagian dari komponen *Good Corporate Governance (GCG)*. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER – 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, disebut bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Prinsip-prinsip GCG berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER – 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, terdiri dari : (1) Prinsip Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; (2) Prinsip Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; (3) Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; (4) Prinsip Kemandirian (*independency*),

yaitu keadaan di mana perusahaan di kelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; (5)

Prinsip Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan GCG di Indonesia masih bersifat sukarela sehingga tidak ada sanksi yang diberikan apabila perusahaan tidak melaksanakan *Good Corporate Governance*. Poin 7 pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia menjelaskan perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, dan perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, diharapkan menjadi pelopor dalam penerapan Pedoman GCG ini. Regulator juga diharapkan dapat menggunakan Pedoman GCG ini sebagai acuan dalam menyusun peraturan terkait serta sanksi yang perlu dikenakan.

Perusahaan yang terlalu mementingkan keuntungan, pada akhirnya akan menjadi perusahaan yang sulit berkembang. Perusahaan tidak boleh hanya mementingkan kepentingannya saja melainkan harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Sukoharsono (2005),

“The demand of more environmentally friendly product in international market today, really challenge managers/entrepreneur to get more aware to environmental issue. In fact, sooner or later the demand itself should be put into integral part of company strategy. And there will be a time when the corporate should receive ecology as cost of production factor. In globalization terminology this strategy is more favorable if it is applied in long term strategy than in short or in middle term.”

Hal inilah yang membuat perusahaan harus memiliki rasa pertanggungjawaban sosial atau yang lebih dikenal dengan nama *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Berbagai regulasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam bidang lingkungan khususnya pelaporan lingkungan sudah banyak diberlakukan di berbagai negara. Diantaranya seperti yang sudah diberlakukan di Amerika Serikat. Amerika Serikat membuat regulasi mengenai lingkungan tertuang dalam US National Environment Policy Act (NEPA) di tahun 1970. Kebijakan tersebut mengatur tentang polusi udara, air dan tanah. Sedangkan di Indonesia, aturan CSR tertuang dalam pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yakni UU Nomor 40 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah NO. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Berdasarkan pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dalam pasal 1 angka 3 UUPT, dijelaskan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta



dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Melalui undang-undang ini, industri atau koperasi wajib untuk melaksanakan CSR tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan.

Kinerja lingkungan merupakan suatu bukti langsung yang juga dapat dijadikan alat pembanding antara laporan berkelanjutan yang diterbitkan perusahaan dengan keadaan riil di lapangan. Seringkali media menyebarkan informasi terkait beberapa perusahaan besar yang melakukan kegiatan CSRnya, baik itu kegiatan positif berupa pembagian beasiswa, pelatihan ibu rumah tangga, penanaman pohon, pembangunan sarana ibadah maupun sarana pendidikan dan lainnya.

Bertolak belakang dengan apa yang dilaporkan, tak sedikit pula keadaan riil yang merugikan lingkungan, seperti yang dilansir dalam sebuah artikel pada regional.kompas.com, Indonesia Corruption Watch menemukan terdapat lima perusahaan yang bergerak di pertambangan, perkebunan, dan kehutanan beroperasi di cagar alam Teluk Adang di Kabupaten Paser. Penelitian organisasi nirlaba ini menghasilkan dugaan pelanggaran atas izin operasi, produksi, eksplorasi hingga pengawasan di sektor pertambangan yang tidak maksimal. Pelanggaran berat lainnya ditemukan pula di daerah cagar alam, seperti tidak adanya pemulihan air tanah, penebangan kayu yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan lalu adanya dugaan korupsi dari aparaturnegara. Hutan konservasi sejatinya tertutup untuk kegiatan yang bukan kehutanan. Aktivitas seperti

pertambangan di kawasan konservasi melanggar Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Jika ada pertambangan, kegiatan yang diijinkan di kawasan hutan lindung hanya diperbolehkan dalam bentuk pertambangan di bawah tanah, bukan di atas tanah.

Perusahaan pertambangan dalam kegiatan operasionalnya menyumbang dampak yang besar bagi lingkungan. Hal ini dikarenakan yang menjadi objek tambang adalah sumber daya alam yang sudah berusia ratusan tahun, dan untuk mengeksplor sumber daya tersebut diperlukan teknologi seperti mesin untuk menggali ke permukaan bumi. Upaya eksplorasi yang dilakukan ini berujung pada eksploitasi besar-besaran sumber daya alam tersebut. Seringkali tindakan pencegahan selalu terlambat dilakukan sehingga dampak berupa perusakan lingkungan, keringnya lahan, dan sebagainya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Maka dari itu, dapat dikatakan CSR perusahaan pertambangan merupakan CSR yang kompleks dibandingkan sektor perusahaan lainnya seperti pertanian, perbankan, dll.

Hal inilah yang menarik minat penulis untuk menganalisa sejauh mana perusahaan pertambangan di Indonesia menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dengan judul “Analisis Konten dan Komparatif *Good Corporate Governace Report & Corporate Social Responsibility Report* berdasarkan Pedoman Umum GCG dan Standar GRI G4



(Studi kasus pada Laporan Tahunan dan *Sustainability Report* Indo Tambangraya Megah dan Tambang Batubara Bukit Asam tahun 2013)”.
 Repository Universitas Brawijaya

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bermula dari beberapa penelitian terdahulu yang mengaitkan antara *Good Corporate Governance* dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Berbagai metode analisis dilakukan hingga menghasilkan beragam hasil penelitian. Berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu :

Tabel 1.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Niya (2010)	Meneliti praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006.	<i>Content Analysis</i>	Laporan Tahunan - Overview - Surat dewan komisaris - Surat dewan direksi - Feature - Catatan atas Laporan Keuangan - Diskusi dan Analisa Manajemen	- CSR perusahaan sudah dilaporkan di dalam laporan tahunan perusahaan. - Perusahaan manufaktur cenderung mengungkapkan tema ketenagakerjaan dibandingkan tema lainnya - Diduga perusahaan masih sedikit melakukan aktivitas sosial.
2.	Angelica (2012)	Meneliti pengaruh karakteristik <i>corporate governance</i>	Regresi Berganda	- Ukuran dewan komisaris - Komposisi dewan komisaris - Frekuensi rapat	Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR adalah ukuran dewan



		terhadap pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan <i>listed</i> di BEI tahun 2010		dewan komisaris - Ukuran komite audit - Independensi komite audit - Frekuensi rapat komite audit	komisaris, komite audit independen, dan frekuensi rapat komite audit.
3.	Fitri (2013)	Meneliti pengaruh karakteristik <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) terhadap luas pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2011.	Regresi Berganda	- Ukuran Dewan Komisaris - Frekuensi rapat dewan komisaris - Proporsi dewan komisaris independen - Ukuran komite audit - Frekuensi rapat komite audit - Kompetensi komite audit - Kepemilikan saham manajerial - Kepemilikan saham institusional - Kepemilikan saham asing - Kepemilikan saham terkonsentrasi	Pengungkapan CSR perusahaan di Indonesia yang <i>listed</i> di BEI tahun 2011 dipengaruhi oleh mekanisme GCG yakni kepemilikan saham terkonsentrasi. Karena melalui kepemilikan saham ini dapat mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen.
4.	Asisiura (2014)	Meneliti penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT Len Industri (PERSERO)	Studi Kasus (wawancara, dokumentasi data internal dan observasi)	Prinsip-prinsip GCG (Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran)	Keseluruhan prinsip sudah diterapkan dengan baik namun perlu diperbaiki dalam beberapa hal, seperti : - Kejelasan peraturan



					penerimaan karyawan. - Penyempurnaan kebijakan <i>whistleblower</i> - Perlu adanya peraturan terkait gratifikasi
5.	Rantetoding (2015)	Meneliti penerapan GCG dan CSR berdasarkan pedoman umum GCG (KNKG 2006) dan standar GRI G4	Analisis Konten dan Komparatif	<i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (Laporan tahunan dan <i>Sustainability Report</i> Indo Tambangraya Megah dan Tambang Batubara Bukit Asam 2013)	???

1.3 Batasan Penelitian

Demi memfokuskan penelitian ini, perhatian peneliti akan ditekankan pada analisa konten dan komparatif pada pengungkapan informasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan yang digunakan adalah periode 2013.

Pada bagian GCG, fokus penelitian terletak pada sejauh mana ke-5 prinsip dasar GCG diterapkan oleh perusahaan pertambangan. Prinsip tersebut antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Untuk bagian CSR, fokus penelitian terletak pada sejauh mana kategori yang terletak pada aspek material (kategori ekonomi, lingkungan dan sosial) diterapkan oleh perusahaan.



1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana penerapan Pedoman Umum Kebijakan Governance (KNKG 2006) yang tertuang dalam *Good Corporate Governance (GCG) Report* kedua perusahaan pertambangan ?
2. Bagaimana pengungkapan yang terdapat didalam *Corporate Social Responsibility (CSR) Report* yang dilakukan kedua perusahaan pertambangan berdasarkan Standar GRI G4 ?
3. Bagaimana hasil perbandingan antara penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* kedua perusahaan pertambangan tersebut?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain :

1. Memahami penerapan Pedoman Umum Kebijakan Governance (KNKG 2006) yang tertuang dalam *Good Corporate Governance (GCG) Report* kedua perusahaan pertambangan.
2. Memahami pengungkapan yang terdapat didalam *Corporate Social Responsibility (CSR) Report* yang dilakukan kedua perusahaan pertambangan berdasarkan Standar GRI G4.



3. Memahami hasil perbandingan antara penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kedua perusahaan pertambangan tersebut

1.6 Kontribusi Penelitian

Bagi penulis ;

- 1) Menambah pengetahuan mengenai tata kelola perusahaan yang berdasar pada Pedoman Umum Kebijakan Governance (KNKG 2006).
- 2) Menambah pemahaman akan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan Standar GRI G4.

Bagi perusahaan ;

- 1) Menjadi acuan dan evaluasi dalam pendekatan lingkungan dan kesadaran untuk terus melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2) Mendorong perusahaan untuk memanfaatkan CSR sebagai salah satu sarana menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dan untuk kepentingan jangka panjang perusahaan.

Bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan:

- 1) Sebagai pemahaman akan pentingnya melaksanakan kebijakan lingkungan yang ditetapkan perusahaan ataupun pemerintah sebagai tanggung jawab bersama.
- 2) Sebagai bahan acuan atau tambahan referensi penelitian lain yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan maupun tanggung jawab sosial perusahaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Good Corporate Governance*

2.1.1 Definisi *Good Corporate Governance*

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. OECD mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

“Corporate governance refers to the structures and processes for the direction and control of companies. Corporate governance concerns the relationships among the management, Board of Directors, controlling shareholders, minority shareholders and other stakeholders. Good corporate governance contributes to sustainable economic development by enhancing the performance of companies and increasing their access to outside capital.”

Dengan kata lain, definisi tersebut memberi arti pentingnya kerja sama yang baik antara manajemen, dewan komisaris, direksi, pemegang saham mayoritas maupun minoritas dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Good Corporate Governance menurut definisi Bank Dunia (*World Bank*) adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Menurut Zarkasyi (2008:36) definisi dari *Good Corporate Governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses,output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi terciptanya tujuan perusahaan.

Dari beberapa definisi diatas, dengan demikian *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan baik itu sistem manajemen, kumpulan aturan atau kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah perusahaan yang memiliki hubungan baik antara pemegang saham dan *stakeholder* lainnya, sehingga perusahaan dapat dikelola dengan baik dan tercipta sebuah akuntabilitas publik.

2.1.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan KNKG 2006

Di dalam penerapan *Good Corporate Governance* terdapat beberapa prinsip-prinsip berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER – 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 antara lain (a) Transparansi; (b)Akuntabilitas; (c) Pertanggungjawaban; (d) Kemandirian; dan (e)Kewajaran.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER – 01/MBU/2011 pasal 3 mendefinisikan **transparansi** sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Selain itu, menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menjelaskan bahwa transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan



(*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Selain itu, perusahaan diharapkan untuk senantiasa mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER – 01/MBU/2011 pasal 3 mendefinisikan **akuntabilitas** sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Selanjutnya menurut KNKG menjelaskan bahwa akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Kejelasan fungsi dalam organisasi berguna untuk kesinambungan sebuah organisasi. Maka dari itu, akuntabilitas perusahaan dilihat dari penetapan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER – 01/MBU/2011 pasal 3 mendefinisikan **pertanggungjawaban** sebagai kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selanjutnya menurut KNKG menjelaskan bahwa pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan



tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Prinsip kehati-hatian harus dimiliki oleh segenap organ perusahaan serta kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER – 01/MBU/2011 pasal 3 mendefinisikan **independensi** sebagai keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Selanjutnya menurut KNKG menjelaskan bahwa independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kemandirian dapat ditunjukkan dari tidak adanya dominasi oleh pihak manapun. Tidak adanya dominasi dari pihak manapun ini bisa berjalan salah satunya dengan cara melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada saling lempar tanggung jawab di dalamnya.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER – 01/MBU/2011 pasal 3 mendefinisikan **kewajaran** sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya menurut KNKG menjelaskan bahwa kewajaran (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya baik



itu antara pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tidak hanya mengutamakan pemegang saham, kewajaran dalam hal ini juga berlaku dalam hal penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

2.1.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan OECD

Secara umum terdapat enam prinsip corporate governance dalam Prinsip-prinsip OECD 2004 mengenai corporate governance. Keenam prinsip ini menjelaskan hal-hal yang mencakup, kerangka dasar corporate governance, hak pemegang saham, kesetaraan perlakuan pemegang saham, peranan stakeholders, keterbukaan dan transparansi, serta tanggung jawab dewan komisaris.

Prinsip I ialah Menjamin Kerangka Dasar Corporate Governance yang Efektif Prinsip I OECD ini menekankan pada hal-hal untuk memastikan bahwa dasar atau basis bagi pengembangan kerangka Corporate Governance yang efektif. Secara umum prinsip I menyatakan bahwa “Corporate Governance harus dapat mendorong terciptanya pasar yang transparan dan efisien, sejalan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, dan dapat dengan jelas memisahkan fungsi dan tanggungjawab otoritas-otoritas yang memiliki pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Prinsip II ialah Hak-hak Pemegang Saham dan Fungsi-fungsi Penting Kepemilikan Saham Prinsip corporate governance yang ke dua dari OECD



pada dasarnya mengatur mengenai Hak-hak Pemegang Saham dan fungsifungsi kepemilikan saham. Hal ini terutama mengingat investor saham terutama dari suatu perusahaan publik, memiliki hak-hak khusus seperti saham tersebut dapat dibeli, dijual ataupun ditransfer. Pemegang saham 17 tersebut juga berhak atas keuntungan perusahaan sebesar porsi kepemilikannya. Selain itu kepemilikan atas suatu saham mempunyai hak atas semua informasi perusahaan dan mempunyai hak untuk mempengaruhi jalannya perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Prinsip III ialah Perlakuan yang sama terhadap Pemegang Saham Pada prinsip ke-3 ini ditekankan perlunya persamaan perlakuan kepada seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan investor di pasar modal. Untuk itu industri pasar modal harus dapat melindungi investor dari perlakuan yang tidak benar yang 21 mungkin dilakukan oleh manajer, dewan komisaris, dewan direksi atau pemegang saham utama perusahaan.

Prinsip IV ialah Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance Prinsip OECD IV (keempat) membahas mengenai Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance (CG). Secara umum, prinsip ini menyatakan bahwa: “Kerangka corporate governance harus mengakui hak stakeholders yang dicakup oleh perundang-undangan atau perjanjian (mutual agreements) dan mendukung secara aktif kerjasama antara perusahaan dan stakeholders dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan yang

berkesinambungan (sustainability) dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan”.

Prinsip V ialah Keterbukaan dan Transparansi Pada prinsip ke-5 ini ditegaskan bahwa kerangka kerja corporate governance harus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.

PRINSIP VI ialah Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Prinsip GCG dari OECD yang terakhir (ke-enam) berkaitan dengan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi perusahaan. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham.

2.1.3 Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* tentu memberi manfaat pada perusahaan dalam jangka panjang baik itu dalam pertumbuhan dan perkembangan perusahaan ke depannya. Manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* menurut KNKG 2006, antara lain:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Dari keenam manfaat GCG di atas, dapat dipastikan bahwa perusahaan yang telah menerapkan prinsip GCG tidak hanya memiliki kualitas kinerja yang baik melainkan juga berdampak bagi eksternal perusahaan. Dengan dioptimalkannya seluruh sumber daya dalam perusahaan, maka kinerja yang dihasilkan pun akan optimal di mata para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, masyarakat, pemerintah, dan sebagainya.

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.2.1 Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)

Akuntansi sosial dan lingkungan (yang kita ketahui juga sebagai akuntansi sosial, akuntansi lingkungan, *corporate social reporting*, *corporate social responsibility reporting*, *non-financial reporting*, atau *sustainability accounting*) adalah proses pengkomunikasian efek sosial dan lingkungan dari tindakan ekonomi organisasi kepada beberapa kelompok tertentu dalam suatu lingkungan (Gray, 1994).

Zarkasyi (2007: 10) mendefinisikan akuntansi sosial dan lingkungan adalah suatu usaha untuk mengganti kerugian dengan pertimbangan bahwa organisasi mempengaruhi, melalui tindakannya, pada lingkungan eksternal (baik secara positif dan negatif) dan karenanya harus memperhitungkan efek-efek sebagai bagian dari keseluruhan akuntansi sebagai tindakannya.

Dari kedua definisi diatas, dapat dilihat bahwa salah satu aspek dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah komitmen. Komitmen perusahaan yang berkelanjutan untuk mensejahterakan tidak hanya dari segi keuangan perusahaan saja melainkan membangun kesejahteraan masyarakat secara luas.

2.2.2 Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR)

Manfaat dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) tentunya tidak hanya didapat oleh perusahaan saja tetapi juga didapat oleh masyarakat, lingkungan,



dan negara. Seperti yang dikemukakan dalam Wibisono (2007,hal 99) antara lain :

1. Bagi Perusahaan. Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. *Pertama*, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. *Kedua*, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*). *Ketiga*, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. *Keempat*, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).

2. Bagi Masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan mengharagai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.

3. Bagi Lingkungan. praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya.

4. Bagi Negara. praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut "*corporate misconduct*" atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu,

negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda (Suwardjono, 2005). Security Exchange Committee (SEC) menuntut lebih banyak pengungkapan karena pelaporan keuangan mempunyai aspek sosial dan publik. Oleh karena itu, pengungkapan dituntut lebih dari sekedar pelaporan keuangan, tetapi meliputi pula penyampaian informasi kualitatif dan kuantitatif, baik yang mandatory maupun voluntary disclosure (Chrismawati, 2007)

2.2.3 Definisi *Sustainability Reporting*

Menurut *Global Reporting Initiative (GRI)*, *sustainability reporting* merupakan laporan yang mengukur, mengungkapkan dan menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada pihak eksternal dan internal serta laporan yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan *sustainable development*.

Corporate sustainability is a business approach that creates long term shareholder value by embracing opportunities and managing risks deriving from economic, environmental and social developments.

Corporate sustainability leaders achieve long term shareholder value by gearing their strategies and management to harness the market's potential for sustainability products and services while at the same time successfully reducing and avoiding sustainability costs and risks.

Sustainability Report muncul sebagai bentuk pertanggung jawaban tertulis kepada para *stakeholders* yang mengungkapkan sepenuhnya atas tindakan

sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Sebuah laporan dibuat tentunya memiliki standar sendiri atas kerangka pelaporan. Kerangka pelaporan yang digunakan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah GRI G4.

2.2.4 Global Reporting Initiative (GRI) G4

Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia adalah menunjukkan standar yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*). G4, generasi keempat Pedoman Pelaporan CSR ini diluncurkan pada bulan Mei 2013. Tujuan sederhana dari G4 adalah untuk membantu perusahaan menyusun laporan keberlanjutan yang bermakna – dan membuat pelaporan keberlanjutan yang mantap dan terarah menjadi praktek standar. G4 memusatkan pelaporan pada konsep materialitas. Ini artinya mendorong organisasi perusahaan untuk hanya memberikan informasi tentang hal-hal yang sangat penting agar dapat mencapai tujuan organisasi untuk keberlanjutan dan mengelola dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Karakter pertama dan utama dari standar itu adalah fokus pada isu-isu yang material. Walaupun standar ini memiliki banyak aspek, setiap pengguna standar ini diminta untuk terlebih dulu menguji aspek mana saja yang material untuk dilaporkan. Materialitas sendiri dalam G4 digambarkan sebagai persilangan antara (1) signifikansi dampak ekonomi, sosial, serta lingkungan organisasi perusahaan, dan (2) pengaruh terhadap penilaian dan keputusan pemangku kepentingan. Untuk aspek-aspek yang dianggap material, pelaporan kinerja

harus dilakukan dengan mendalam. Sedangkan aspek yang kurang material bisa dilaporkan, namun dengan lebih dangkal.

Kedua, G4 menghilangkan level aplikasi yang ada pada generasi-generasi sebelumnya. Banyak pakar yang mengamati bahwa penggunaan level aplikasi A, B, dan C telah membuat banyak organisasi perusahaan salah sangka. Kebanyakan mereka ingin mendapatkan level A, karena beranggapan bahwa level ini menandai kinerja yang tinggi. Padahal level hanya menandai jumlah indikator yang dilaporkan. Level ini telah membuat kecenderungan pelaporan keberlanjutan yang semakin tebal, karena organisasi ingin memuat semua indikator (level A), termasuk yang tidak penting dilaporkan. Sebagai gantinya, G4 membuat dua skema “*in accordance*”. Skema pertama adalah “Inti”, yang berarti perusahaan akan memilih minimal 1 indikator di setiap aspek yang material untuk dilaporkan. Sedangkan pada skema kedua, “Komprehensif”, seluruh indikator di setiap aspek yang material akan dilaporkan.

Ekspansi batas-batas pelaporan adalah karakter yang ketiga. Pada generasi sebelumnya, yang dilaporkan utamanya adalah sebatas pada kinerja organisasi. Sedangkan pada G4, yang harus dilaporkan adalah sepanjang mata rantai nilai. Ini berarti setiap organisasi perusahaan harus juga mengulas kinerja keberlanjutan, dimulai dari rantai pasokan hingga rantai pasarnya, bahkan pemanfaatan produknya oleh konsumen. Hal ini sangat tampak dari berbagai indikator baru yang memasukkan konsideran rantai nilai dalam dampak lingkungan, ketenagakerjaan, HAM, dan masyarakat.

Keempat, penekanan pada unsur tata kelola serta etika. Bagaimana fungsi organisasi pengawas, misalnya Dewan Komisaris pada perusahaan, terkait dengan isu-isu keberlanjutan sangat ditekankan pada G4. Sangat jelas terbaca bahwa peran sumber daya manusia yang menguasai isu-isu keberlanjutan semakin didorong oleh standar baru ini. Yang mungkin kurang mengenakan—walau sebagian kecil organisasi perusahaan juga telah memulai mengungkapkannya—adalah indikator-indikator mengenai remunerasi. G4 tampak sangat menekankan pada pelaporan rasio remunerasi antar-tingkat pekerja, yang berarti standar ini sangat ingin mendorong pengurangan ketimpangan remunerasi yang selama ini semakin parah.

Standar GRI G4 (2013), terdapat dua jenis pengungkapan, yakni Pengungkapan Standar Umum dan Pengungkapan Standar Khusus. Pengungkapan standar umum menetapkan konteks keseluruhan untuk laporan, memberikan gambaran tentang organisasi dan proses pelaporannya. Pengungkapan ini berlaku untuk semua organisasi terlepas dari penilaian materialitas. Sedangkan pengungkapan standar khusus dibagi menjadi dua bagian yakni DMA dan Indikator. DMA atau Pengungkapan Pendekatan Manajemen mengarah pada aspek yang ingin dikelola oleh perusahaan. Setidaknya ada 3 aspek didalamnya yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Dari tiga hal tersebut dijelaskan mengapa aspek tersebut material, bagaimana dampaknya dikelola dan bagaimana pengelolaan aspek ini dievaluasi. Sedangkan Indikator sebisa mungkin memberikan informasi tentang dampak yang dihasilkan oleh ketiga aspek baik ekonomi, lingkungan atau sosial.

Selain pengungkapan standar umum dan standar khusus, terdapat pula pelaporan tentang isu-isu sektor spesifik. Adanya pelaporan spesifik dikarenakan tidak semua perusahaan atau organisasi bergerak pada bidang yang sama dan untuk hal-hal tertentu perusahaan dengan sektor tertentu wajib mencantumkan salah satu indikator spesifik di dalam laporan keberlanjutan.

Setidaknya terdapat enam elemen penting yang harus ada dalam laporan G4, antara lain :

- 1) Pilih opsi ‘sesuai’ yang tepat untuk organisasi anda, dan penuhi persyaratannya.
- 2) Jelaskan bagaimana anda mengetahui aspek-aspek material organisasi, berdasarkan dampak dan harapan para pemangku kepentingan.
- 3) Tunjukkan dengan jelas di mana dampak terjadi (*boundary*).
- 4) Uraikan pendekatan organisasi untuk mengelola setiap aspek materialnya (DMA).
- 5) Laporkan indikator untuk setiap aspek material menurut opsi ‘sesuai’ yang dipilih.
- 6) Bantu pemangku kepentingan anda menemukan konten yang relevan dengan memberikan Indeks Konten GR.

Dalam standar GRI G4 (2013), standar pengungkapan umum terdiri dari 58 komponen yang harus dicantumkan oleh semua perusahaan atau organisasi terlepas dari aspek materialitasnya. Standar pengungkapan khusus yang dibagi menjadi 3 aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial, mencapai total indikator 91 kinerja, terdiri dari 9 indikator ekonomi, 34 indikator lingkungan, 16



indikator praktek tenaga kerja, 12 indikator Hak Asasi Manusia, 11 indikator kemasyarakatan dan 9 indikator tanggung jawab produk. Pelaporan isu-isu spesifik terdiri atas 10 indikator yang terbagi menjadi 1 kategori yaitu 3 indikator lingkungan dan 7 indikator sosial.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menitikberatkan pada telaah informasi dalam literatur teori yang berhubungan dengan tema besar penelitian. Selain itu, dilakukan pula telaah dokumen (laporan tahunan dan *sustainability report*) secara menyeluruh mengenai pengungkapan aktivitas CSR. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian (misalnya penelitian perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya) secara holistic dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong,2005).

Denzin dan Lincoln (1994) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut:

Qualitative research is multimethod in focus, involving an interpretive, naturalistic approach to its subject matter. This means that qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of the meanings people bring to them. Qualitative research involves the studied use and collection of a variety of empirical materials – case study, personal experience, introspective, life story, interview, observational, historical, interactional, and visual texts – that describe routine and problematic moments and meaning in individuals' lives (Denzin and Lincoln, 1994:2)

Dari kedua definisi diatas baik Moleong maupun Denzin and Lincoln, pemahaman akan penelitian kualitatif lebih kepada interpretasi dalam bentuk kata-kata akan fenomena yang terjadi dengan mengumpulkan data baik itu dari observasi langsung, studi kasus, wawancara, pengalaman hidup dan sebagainya.

Pada penelitian deskriptif, analisis data tidak bertujuan untuk menerima ataupun menolak hipotesis, melainkan hasil dari analisis ini ada sebuah gambaran akan variabel, gejala atau keadaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan praktik tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) pada 2 perusahaan pertambangan di Indonesia untuk laporan tahunan dan *sustainability report* periode 2013. Penelitian ini membandingkan pelaksanaan GCG dan CSR kedua perusahaan tersebut dengan pedoman dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2006 yang kemudian diubah menjadi PER-01/MBU/2011 dan disempurnakan lewat PER-09/MBU/2012, serta *GRI Standard* 4.

3.2 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2013. Pemilihan perusahaan pertambangan dikarenakan sektor perusahaan pertambangan memiliki CSR yang lebih kompleks dibandingkan CSR sektor perusahaan lainnya.

Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive judgement sampling*, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Mirfazli dan Nurdiono, 2007). Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel adalah :

- 1) Perusahaan pertambangan yang terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia tahun 2013.
- 2) Perusahaan menerbitkan Laporan Tahunan secara lengkap untuk periode 2013.
- 3) Perusahaan memiliki Laporan Tata Kelola yang terdapat di dalam Laporan Tahunan periode 2013.
- 4) Perusahaan menerbitkan *Sustainability Report* yang terpisah dari Laporan Tahunan dengan berdasar pada Standar GRI G4.
- 5) Laporan tahunan dan *Sustainability report* perusahaan dapat diakses melalui website : www.idx.co.id atau website milik perusahaan bersangkutan.

Setelah melewati 5 kriteria diatas, pada akhirnya terpilihlah 2 perusahaan yaitu:

- a. Indo Tambangraya Megah Tbk.
- b. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.

3.2 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan yaitu laporan tahunan dan *sustainability report*. Tahun pengungkapan laporan yang diambil adalah tahun 2013 mengingat masih banyaknya laporan tahunan 2014 yang belum selesai diaudit ataupun belum dipublikasikan.

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku maupun tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan pada penelitian ini yakni penelusuran akan jurnal-jurnal yang terkait dengan akuntansi pertanggungjawaban sosial dan juga buku-buku yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Penelusuran kepustakaan sebagian besar merupakan penelusuran online melalui situs-situs yang relevan.

2. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data-data yang dilakukan dengan mengumpulkan segala dokumen baik dari BEI maupun website perusahaan yang mempunyai relevansi terhadap kebutuhan penelitian yang nantinya akan dilakukan.

Dokumen yang dikumpulkan dari studi dokumentasi ini berkaitan dengan 2 perusahaan yang menjadi objek penelitian. Dokumen tersebut antara lain laporan tahunan dan *sustainability report* periode 2013.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Pada intinya, instrument penelitian adalah alat bantu untuk mengumpulkan data secara terencana.

Dalam penelitian ini instrumen penelitian adalah tabel pengungkapan GCG dan tabel pengungkapan CSR. Pengisian tabel dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengisi judul di setiap tabel dengan nama yang tepat baik itu tabel untuk pemenuhan prinsip GCG maupun pemenuhan indikator CSR.
- b. Mengisi kolom-kolom dengan hasil proses *content analysis* yang menelusuri dokumen perusahaan. Jika perusahaan tidak mengungkapkan CSR pada laporan tahunannya maka kolom tersebut dikosongkan.

Tabel 3.1 menunjukkan tabel yang digunakan untuk mengungkapkan pemenuhan pengungkapan GCG berdasarkan 5 prinsip dasar GCG. Sebagai contoh, tabel berikut adalah tabel pemenuhan untuk prinsip dasar yang pertama, transparansi.

Tabel 3.1
Prinsip-prinsip Dasar GCG

	PRINSIP DASAR GCG	Perusahaan ITMG	Perusahaan PTBA
1	Transparansi		
1.1	Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh		

		pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.		
	1.2	Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.		
	1.3	Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan rahasi jabatan, dan hak-hak pribadi.		
	1.4	Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan		

Tabel 3.2 berikut menunjukkan penemuan pengungkapan CSR berdasarkan aspek material yang terdapat dalam standar GRI G4. Sebagai contoh diambil dari kategori ekonomi.

Tabel 3.2
Kategori Ekonomi GRI G4

Aspek-aspek Material	DMA dan Indikator	Perusahaan ITMG	Perusahaan PTBA
KATEGORI : EKONOMI (DMA EC)			
Kinerja Ekonomi	G4-EC1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan		
	G4-EC2 Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim		
	G4-EC4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah		

Keberadaan Pasar	G4-EC5 Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi - lokasi operasional yang signifikan		
	G4-EC6 Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan		
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	G4-EC7 Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan		
	G4-EC8 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak		
Praktik Pengadaan	G4-EC9 Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan		

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggabungkan metode *content analysis* dan metode komparatif yang dibantu model analisis Miles and Huberman. *Content analysis* merupakan metode penelitian yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat pendugaan (*inference*) atas suatu teks.

Tujuan *content analysis* adalah melakukan identifikasi terhadap karakteristik atau informasi spesifik yang terdapat pada suatu dokumen untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif dan sistematis (Indriantoro dan Supomo, 2002; 159).

Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2005:91-99) mengemukakan

bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus.

Aktivitas peneliti dalam analisis data, yaitu:

1. *Data reduction*. Karena data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara lebih teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data-data direduksi dengan menguji keabsahannya dan keterkaitannya dengan topik penelitian serta landasan teori yang digunakan.

Dalam penelitian ini, penggunaan *content analysis* berkaitan dengan pengungkapan GCG dan CSR yang umumnya tersaji dalam bentuk susunan kata. Untuk itu, prosedur *content analysis* yang digunakan mengacu pada teknik yang digunakan oleh Utomo (2000). Teknik ini dimulai dengan bagian GCG terlebih dahulu. Penelusuran pada laporan tahunan yang termasuk ke dalam 5 prinsip dasar GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran). Setelah itu, dilakukan penelusuran untuk bagian CSR. Pengungkapan CSR yang dilakukan hanya pada aspek material saja. Aspek material yang dimaksud adalah pengungkapan berdasar pada kategori ekonomi, kategori lingkungan dan kategori sosial. Aspek umum dalam pelaporan tidak dicantumkan.

Setelah penelusuran *content analysis* tersebut, langkah selanjutnya adalah pembuatan tabel seperti yang dicantumkan sebelumnya pada tabel 3.1 dan

3.2. Tabel ini berisikan tentang ada atau tidaknya komponen indikator baik itu Indikator *Good Corporate Governace* atau Indikator *Corporate Social Responsibility*. Indikator GCG berdasar pada Pedoman KNKG 2006, sedangkan indikator CSR berdasar pada GRI4. Ada atau tidaknya komponen indikator tersebut dilihat dari Laporan Tahunan dan juga Indeks GRI yang terdapat dalam *Sustainability Report* perusahaan. Tabel tersebut dapat dilihat pada keseluruhan Lampiran.

2. *Data display*. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan anatar kategori, struktur, cuplikan, kutipan dan sejenisnya. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data dengan tabel atau cuplikan gambar, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Yang paling sering digunakan untuk menyiapkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.



Dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 analisis terhadap isi laporan historis baik yang dalam bentuk laporan tahunan maupun *sustainability report* yang dikeluarkan perusahaan. Proses analisis dilakukan dengan mencari aspek-aspek yang terdapat dalam tabel kerja apakah dilaporkan atau tidak dalam laporan tahunan dan *sustainability report*. Setelah itu, penulis mengisi tabel kerja berdasarkan hasil analisis yang akan dibahas dalam pembahasan dan membuat ringkasan atas hasil yang didapatkan dari tabel kerja.

3. *Conclusion drawing* atau *verification*. Data ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan didasarkan pada analisis subjektif penulis ketika menganalisa dan membandingkan pengungkapan tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan melalui laporan tahunan dan *sustainability report* masing-masing perusahaan.



BAB IV

PEMBAHASAN MASALAH

4.1 Profil Perusahaan

4.1.1 Indo Tambangraya Megah Tbk

4.1.1.1 Sejarah Indo Tambangraya Megah Tbk

Indo Tambangraya Megah berdiri pada tahun 1987 sebagai Perseroan Terbatas, kemudian pada tahun 2007 diakuisisi oleh Grup Banpu Thailand dan selanjutnya pada bulan Desember 2007 menjadi perusahaan terbuka. Banpu melalui PT Centralink Wisesa International memiliki 77,60% saham, PT Sigma Buana Cemerlang 2,40% dan selebihnya merupakan saham masyarakat.

Pada tahun 2008, saham PT Centralink Wisesa International dialihkan ke Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. Sebesar 73,72% dan porsi saham publik menjadi 26,28%. Pada tahun 2010, Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. Menjual sahamnya sebesar 8,72% kepada publik dan mempertahankan kepemilikan mayoritas sebesar 65% dan selebihnya dimiliki masyarakat dengan jumlah rendah lebih dari 5% masing-masing.

4.1.1.2 Lokasi Indo Tambangraya Megah Tbk

Lokasi Kalimantan Timur berpusat di Jakarta dan memiliki wilayah operasional di masing-masing anak perusahaan berada yakni Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

4.1.1.3 Visi dan Misi Indo Tambangraya Megah Tbk

Visi ITMG ialah “Menjadi perusahaan energi terkait batu bara terkemuka di Indonesia dengan pertumbuhan yang berkelanjutan yang dicapai melalui profesionalisme dan peduli terhadap para karyawan, masyarakat dan lingkungan”. Misi ITMG antara lain :

- a. Mengembangkan keunggulan pada semua lini operasi untuk melayani pelanggan dengan kualitas dan kuantitas produk dan jasa yang konsisten.
- b. Mengembangkan karyawan yang piawai, sistem dan infrastruktur yang efisien berdasarkan budaya yang berinovasi, berintegritas, berkepedulian dan bersinergi.
- c. Berinvestasi dalam bisnis energi berbasis batu bara yang secara berkelanjutan memperkuat posisi kami.
- d. Mendorong dan berkontribusi bagi perkembangan masyarakat dengan bertindak sebagai warga yang baik dan berkontribusi terhadap ekonomi dan masyarakat.

4.1.1.4 Nilai-nilai Indo Tambangraya Megah Tbk

Banpu Spirit adalah nilai inti yang dipelihara sedemikian rupa agar karyawan, Direksi, Komisaris ITM merasa bangga menjadi bagian dari Perusahaan sehingga pihak luar dapat mengenali nilai-nilai tersebut sebagai karakter karyawan, Direksi, dan Komisaris ITM.

Tabel 4.1

Definisi Makna Masing-masing Nilai Perusahaan

Definisi Masing-masing Nilai Perusahaan		
No	Nilai	Definisi Makna
1	Inovasi	Setiap sumber daya manusia senantiasa berpikir kreatif, cerdas dalam bertindak, berani untuk memulai, berani dan dapat menerima tantangan, proaktif, fleksibel serta cakap dalam berbagai hal, mampu beradaptasi serta ulet, berkembang terus menerus.
2	Integritas	Setiap sumber daya manusia diharapkan selalu jujur, etis, dapat diandalkan, disiplin, gigih, berkomitmen, dan transparan.
3	Peduli	Setiap sumber daya manusia diharapkan memiliki keterbukaan dan ketulusan, dapat menerima dan menampung, menghargai orang lain, menghormati, hangat dan perhatian, baik dan murah hati.
4	Sinergi	Setiap sumber daya manusia diharapkan mampu bekerjasama, berpola pikir terbuka, kerja kelompok, membangun jejaring, saling mendukung dan berbagi, berupaya untuk sama-sama menang.

(Sumber : *Sustainability Report ITM tahun 2013*)

4.1.1.5 Tujuan, Sasaran dan Strategi Umum Indo Tambangraya Megah Tbk

Berdasarkan Akta No. 30 tertanggal 11 Mei 2009 dan Akta No. 24 tertanggal 14 Agustus 2009, dibuat di hadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH, sebagaimana telah disetujui oleh Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM No. AHU-41810.AH.01.02 tertanggal 27 Agustus 2009, maksud dan tujuan perusahaan Indo Tambangraya Megah adalah berusaha dalam bidang pertambangan, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, perdagangan, perindustrian dan jasa.

Untuk mencapai tujuan diatas, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan pada umumnya antara lain batubara, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir.
- b. Pemborongan di bidang pertambangan umum yang meliputi pemboran, pengupasan, penggalian/ penambangan, pengolahan, pemurnian dan kegiatan usaha terkait termasuk pemborongan dalam bidang pertambangan batubara.
- c. Transportasi pertambangan dan batubara termasuk pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas transportasi di bidang pertambangan dan batubara serta kegiatan usaha terkait.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan termasuk pemeliharaan dan perawatan untuk segala macam kendaraan bermotor.
- e. Ekspor impor dan perdagangan hasil pertambangan yang meliputi pasir, batu dan batubara.
- f. Industri pengolahan barang-barang dari hasil pertambangan.
- g. Menyediakan jasa sarana penunjang perusahaan pertambangan, konsultasi bidang pertambangan, jasa bidang konstruksi pertambangan dan jasa penunjang kegiatan pertambangan.

ITM juga menguasai kepemilikan saham mayoritas di 5 anak perusahaan, mengoperasikan 6 konsesi pertambangan di Pulau Kalimantan, yang meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Tengah, dan Selatan. ITM juga

memiliki dan mengoperasikan terminal batubara di Bontang, 3 fasilitas pelabuhan muat, dan 1 pembangkit listrik di Bontang.

4.1.1.6 Anak Perusahaan Indo Tambangraya Megah Tbk

Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) memiliki 7 anak perusahaan dengan wilayah operasional yang berbeda-beda, diantaranya :

a. PT Indominco Mandiri

Memulai produksi di tahun 1997 dan bergerak dalam bidang pertambangan, konstruksi dan perdagangan umum. PT Indominco Mandiri memiliki wilayah operasional di Bontang, Kutai Kertanegara dan Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur.

b. PT Trubaindo Coal Mining

Memulai produksi di tahun 2005 dan bergerak dalam bidang usaha tambang batubara. PT Trubaindo Coal Mining memiliki wilayah operasional di Kecamatan Muara Lawa, Bentian Besar, Muara Pahu dan Damai dari Kutai Barat, Kalimantan Timur

c. PT Bharinto Ekatama

Memulai produksi pada tahun 2012 dan bergerak dalam bidang usaha tambang batubara. PT Bharinto Ekatama memiliki wilayah operasional di Kabupaten Kutai Barat dan Barito Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Tengah.

d. PT Kitadin

Memulai produksi pada tahun 1999 dan bergerak dalam bidang usaha tambang batubara. PT Kitadin memiliki wilayah operasional di Desa Embalut, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur dan di Tandung Mayang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Tmur.

e. PT Jorong Barutama Greston

Memulai produksi pada tahun 1999 dan bergerak dalam bidang usaha pertambangan, perdagangan dan transportasi. PT Jorong Barutama Greston memiliki wilayah operasional di Kecamatan Pelaihari dan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

f. PT ITM Indonesia

Didirikan pada tanggal 16 April 2013 dan bergerak pada usaha perdagangan batubara.

g. PT Tambang Raya Usaha Tama

Didirikan pada tanggal 23 September 2013 dan bergerak pada usaha jasa pertambangan

4.1.1.7 Komposisi Pemegang Saham Indo Tambangraya Megah Tbk

Per 31 Desember 2013, kepemilikan saham di ITM adalah sebagai berikut:

a. Lebih dari 5%

Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd 734.452.000

b. Masyarakat kurang dari 5% 395.318.000

c. Dewan Komisaris dan Direksi 155.000

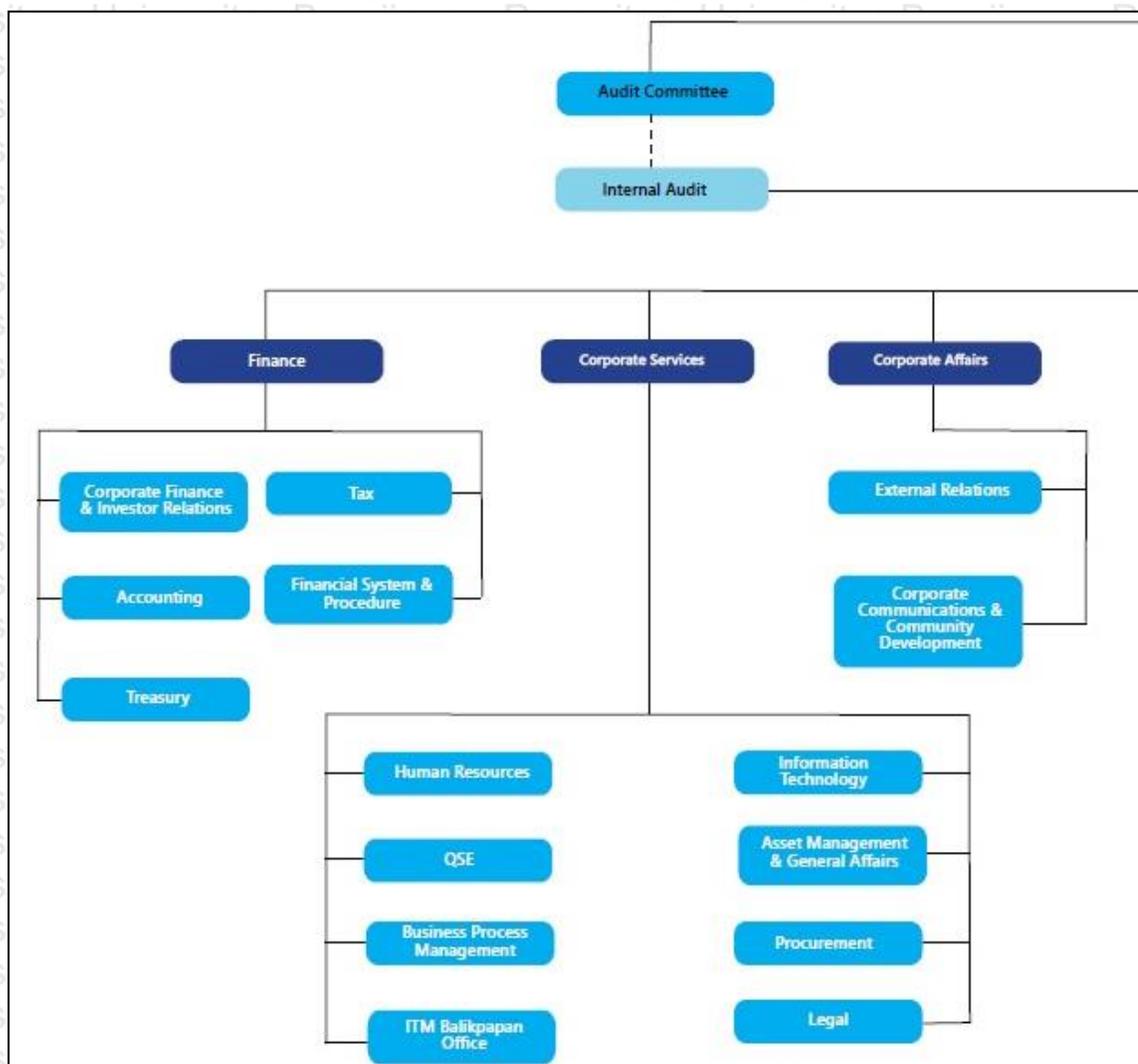
Selain dari yang disebutkan di atas, tidak ada anggota keluarga yang memiliki saham ITM per 31 Desember 2013.

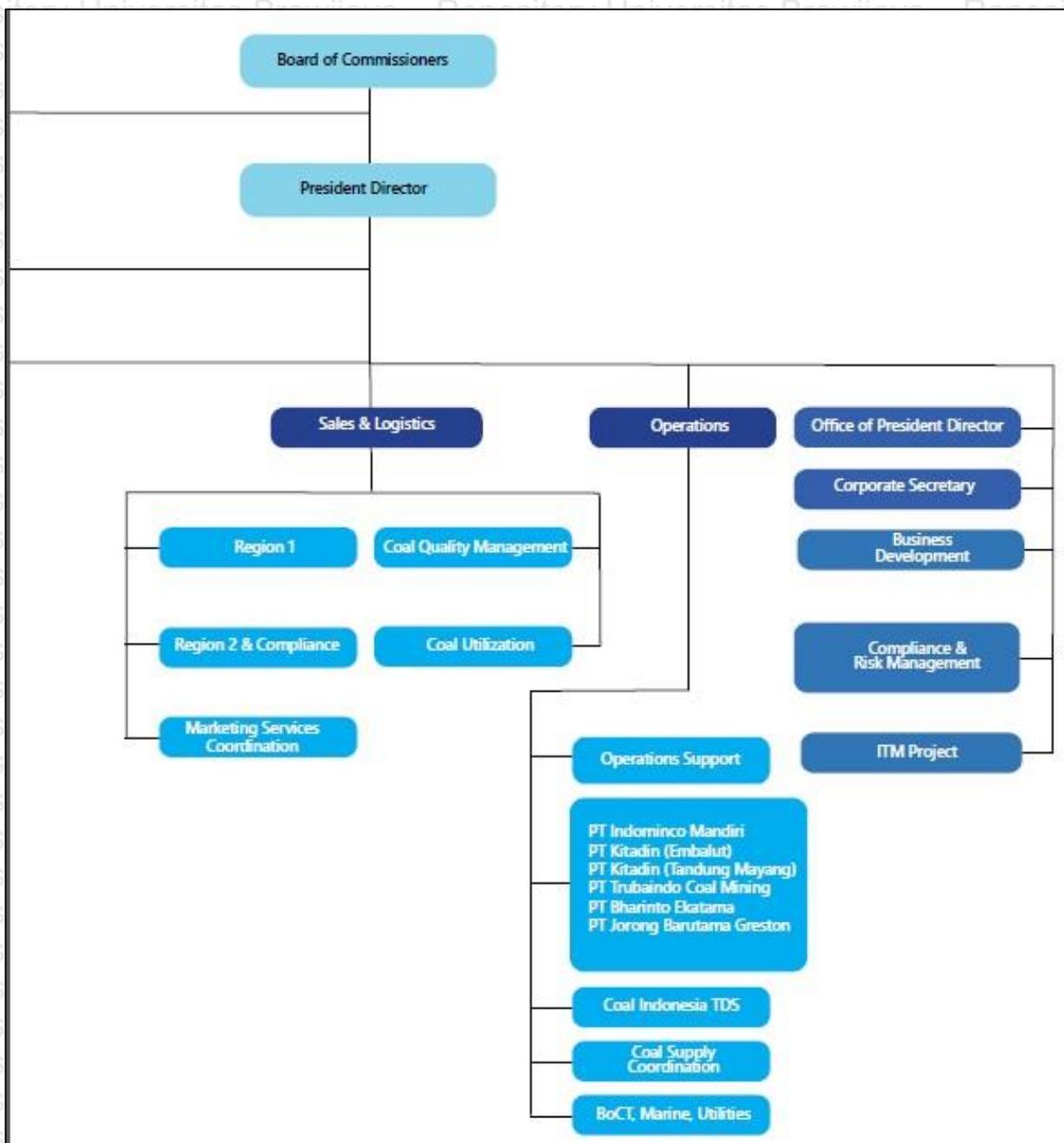
4.1.1.8 Struktur Organisasi Indo Tambangraya Megah Tbk

Struktur organisasi Indo Tambangraya Megah terdiri dari Dewan Direksi dengan seluruh jajarannya, dan juga Dewan Komisaris dengan komite-komite yang terdapat di bawahnya. Struktur organisasi tersebut tertuang dalam gambar dihalaman berikut.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Indo Tambangraya Megah Tbk





(Sumber : Sustainability Report ITM tahun 2013)

4.1.1.9 Sekilas Perkembangan Indo Tambangraya Megah Tbk di tahun 2013

Dalam laporan tahunan, Indo Tambangraya Megah Tbk (selanjutnya disebut ITMG) menyatakan mampu mempertahankan upayanya untuk



meningkatkan penjualan batubara dari 27,2 juta ton pada tahun 2012 menjadi 29,1 juta ton pada tahun 2013. Pertumbuhan sebesar 7% yang dialami Indo Tambangraya Megah Tbk ini merupakan angka penjualan tahun tertinggi yang pernah dicapai oleh ITMG. Tak dipungkiri, banyak tantangan yang dihadapi oleh ITMG selama tahun 2013. Diantaranya, menurunnya harga batubara secara drastis turut berkontribusi pada turunnya pendapatan ITMG pada tahun 2013. Turunnya harga batubara sebesar 12% pada indeks harga batubara dunia mengakibatkan ITMG mengalami penurunan pendapat sebesar 11% dibandingkan dengan tahun 2012. Turunnya harga batubara ini bermula dari program *Quantitative Easing* yang ditetapkan Bank Sentral AS.

Akibatnya fluktuasi harga yang terjadi membuat harga batubara truun sebesar 12% di tahun 2013, dari sekitar US\$96,49 per ton menjadi US\$76 per ton di bulan September, sebelum kembali naik ke level US\$85,13 per ton di akhir tahun. Hal ini membuat segenap direksi untuk terus berupaya meningkatkan efisiensi, kemampuan untuk mengendalikan biaya dan menyesuaikan rencana operasional, pemanfaatan teknologi baru secara inovatif dan kualitas cadangan batubara di lokasi-lokasi tambang.

4.1.2 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

4.1.2.1 Sejarah Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

Sejarah pertambangan batubara di Tanjung Enim dimulai sejak zaman kolonial Belanda tahun 1919 dengan menggunakan metode penambangan terbuka (*open pit mining*) di wilayah operasi pertama, yaitu di Tambang Air

Laya. Selanjutnya di tahun 1923, dimulai metode penambangan bawah tanah (*underground mining*) hingga 1940, sedangkan produksi untuk kepentingan komersial dimulai pada 1938. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan colonial Belanda di tanah air, para karyawan Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional. Pada 1950, Pemerintah RI kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA).

Pada tanggal 1 Maret 1981, PN TABA kemudian berubah status menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), yang selanjutnya disebut Perseroan. Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batubara di Indonesia, pada 1990 Pemerintah menetapkan penggabungan Perum Tambang Batubara dengan Perseroan. Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada 1993 Pemerintah menugaskan Perseroan untuk mengembangkan usaha briket batubara. Pada 23 Desember 2002, Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan "PTBA".

4.1.2.2 Lokasi Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

Wilayah Operasional Tambang Batubara Bukit Asam terdapat di Sumatera Selatan, Riau dan juga anak perusahaan yang terdapat di Samarinda.

4.1.2.3 Visi dan Misi Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

Visi dari PT Bukit Asam adalah “Perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan”. Misi dari PT Bukit Asam adalah “Mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan”.

4.1.2.4 Nilai –nilai Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

Tambang Batubara Bukit Asam dalam keseharian operasionalnya mengacu pada nilai-nilai yang menjadi nilai budaya Tambang Baturabara Bukit Asam. Nilai-nilai tersebut antara lain visioner, integritas, inovatif, professional, sadar biaya dan lingkungan.

Tabel 4.2

Nilai-nilai Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

Definisi Masing-masing Nilai Perusahaan		
No	Nilai	Definisi Makna
1	Visioner	Mampu melihat jauh kedepan dan membuat proyeksi jangka panjang dalam pengembangan bisnis.
2	Integritas	Mengedepankan perilaku percaya, terbuka, positif, jujur, berkomitmen dan bertanggung jawab.
3	Inovatif	Selalu bekerja dengan kesungguhan untuk memperoleh terobosan baru untuk menghasilkan produk dan layanan terbaik dari sebelumnya.
4	Profesional	Melaksanakan semua tugas sesuai dengan kompetensi, dengan kreativitas, penuh keberanian, komitmen penuh, dalam kerjasama untuk keahlian yang terus-menerus meningkat.
5	Sadar Biaya dan Lingkungan	Memiliki kesadaran tinggi dalam setiap pengelolaan aktivitas dengan menjalankan usaha atau asas manfaat yang maksimal dan kepedulian lingkungan.

(Sumber : *Sustainability Report ITM tahun 2013*)

4.1.2.5 Komitmen Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

Tambang Batubara Bukit Asam berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai dari PTBA dan untuk mendirikan budaya perusahaan sebagai dasar dari keberhasilan jangka panjang. PTBA juga mendedikasikan sumber daya energi untuk kehidupan yang lebih baik dari dunia dan bumi.

4.1.2.6 Anak Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

PTBA memiliki beberapa 11 anak perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah tersebut, diantaranya :

- a. PT Batubara Bukit Kendi yang bergerak di bidang penambangan batubara, tetapi karena permasalahan ijin, tidak lagi beroperasi sejak 2010.
- b. PT Bukit Pembangkit Innovative yang bergerak pada bidang pembangkit listrik tenaga uap di sumatera selatan.
- c. PT Bukit Asam Prima yang bergerak di bidang perdagangan batubara dan sudah beroperasi sejak tahun 2007.
- d. PT International Prima Coal bergerak di bidang penambangan batubara sejak 2010 dan beroperasi di Samarinda, Kalimantan Timur.
- e. PT Bukit Asam Banko yang bergerak di bidang penambangan batubara dan sampai saat ini masih belum beroperasi.
- f. PT Bukit Asam Transpacific Railways, bergerak pada bidang angkutan batubara dengan kereta api dari Tanjung Enim ke Lampung. Saat ini masih dalam tahap pengembangan.

- g. PT Huadian Bukit Asam Power, didirikan tahun 2011 dan bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap. Sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan.
- h. PT Bukit Asam Methana Enim bergerak pada bidang penambangan gas metana pada tahun 2007 dan masih dalam tahap pengembangan.
- i. PT Bukit Asam Metana Ombilin bergerak pada bidang penambangan gas metana pada tahun 2007 dan masih belum beroperasi sampai saat ini.
- j. PT Bukit Asam Metana Peranap bergerak pada bidang penambangan gas metana pada tahun 2007 dan masih belum beroperasi sampai saat ini.
- k. PT Bukit Multi Investama dibentuk pada 9 September 2014 untuk bergerak pada bidang perdagangan umum, jasa, percetakan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan darat, perkebunan dan pertanian, pengelolaan hasil serta properti.

4.1.2.7 Komposisi Pemegang Saham Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

Komposisi pemegang saham terdiri dari beberapa macam pemodal yakni Negara Republik Indonesia, Investor Domestik dan Pemodal Asing. Masing masing komposisi terdapat di tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Komposisi Pemegang Saham Tambang Batubara Bukit Asam 2013

No	Kepemilikan	Jumlah Saham (lembar)	Persentase
1	Negara Republik Indonesia	1.498.087.500	65.02%
2	Investor Domestik	1.987.080.171	21.22%
3	Pemodal Asing	317.051.679	13.76%

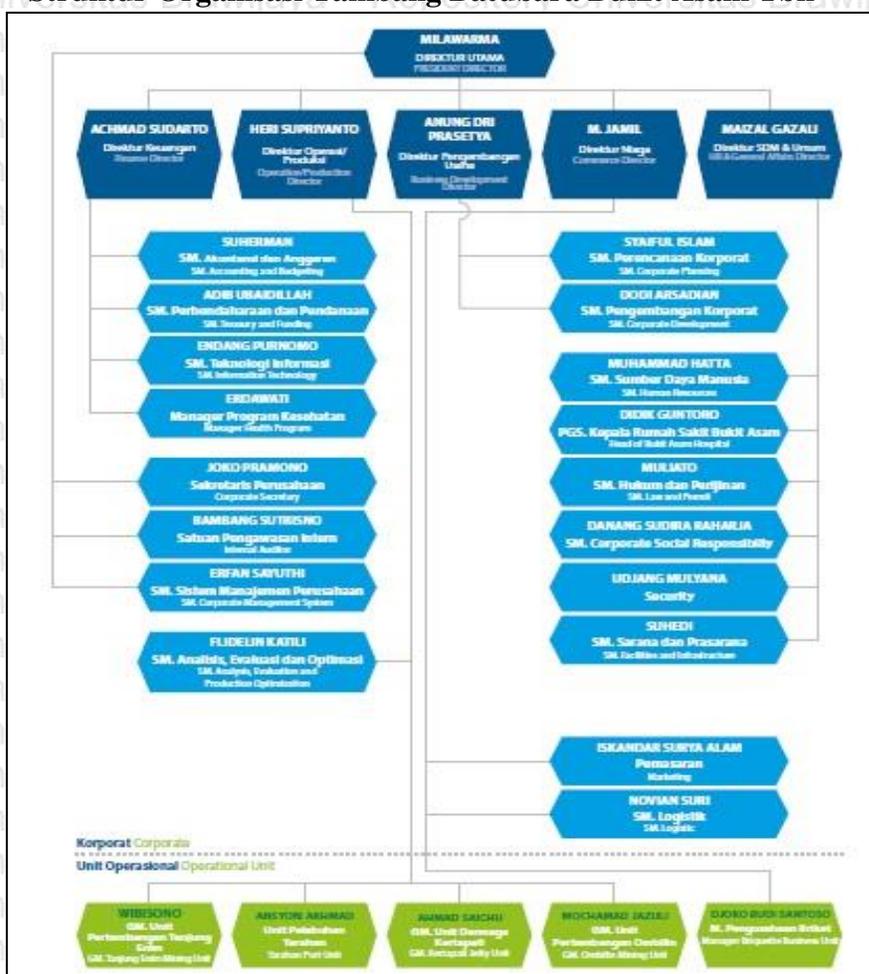
(Sumber : Sustainability Report ITM tahun 2013)

4.1.2.8 Struktur Organisasi Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

Struktur organisasi Tambang Batubara Bukit Asam yang tertinggi adalah direktur utama. Struktur ini merupakan struktur kegiatan operasional perusahaan tanpa melibatkan dewan komisaris.

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Tambang Batubara Bukit Asam Tbk



4.1.2.9 Sekilas Perkembangan Tambang Batubara Bukit Asam Tbk di tahun 2013

Penurunan harga batubara di pasar internasional juga dirasakan oleh PT Bukit Asam. Dengan biaya produksi yang terus meningkat dan harga batubara yang rendah, perusahaan pertambangan khususnya batubara harus menurunkan produksinya bahkan ada yang sampai menghentikan operasinya. Lain halnya dengan PT Bukit Asam, sepanjang tahun 2013, PTBA berhasil meningkatkan volume produksi batubara sebesar 8,00% dari 13,97 juta ton pada tahun 2012 menjadi 15,08 juta ton. Volume penjualan ekspor meningkat 15,8% dari 6,91 juta ton menjadi 9,59 juta ton di tahun 2013. Akan tetapi, penjualan domestik mengalami penurunan sebesar 3% dari 8,43 juta ton pada tahun 2012 menjadi 8,17 juta ton.

4.2 Penerapan Tata Kelola Perusahaan berdasarkan Pedoman Kebijakan Umum Governance (KNKG) tahun 2006

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Tata kelola yang baik menciptakan suasana yang kondusif dan iklim persaingan yang sehat. Pedoman kebijakan umum governance hadir tidak hanya untuk perusahaan yang tergolong dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melainkan menjadi pedoman untuk segala jenis usaha yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Acuan pembahasan Tata Kelola Perusahaan bersumber pada Pedoman Kebijakan Umum

Governance yang diterbitkan oleh KNKG tahun 2006, dan mengalami penyempurnaan melalui Peraturan Menteri Negara BUMN : PER-01/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Negara BUMN: PER-09/MBU/2012.

Pemberlakuan Peraturan Menteri ini dapat diberlakukan terhadap seluruh BUMN, terhadap perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara dan anak perusahaan BUMN, atau bagi BUMN yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat dan/atau telah melakukan *go public* dan bergerak pada sektor-sektor tertentu. Hal ini tertuang dalam BAB XIII Pasal 45 Peraturan Menteri Negara BUMN : PER-01/MBU/2011.

4.2.1 Indo Tambangraya Megah Tbk

4.2.1.1 Transparansi (*Transparency*)

Indo Tambangraya Megah Tbk mempublikasikan seluruh laporannya baik itu laporan tahunan, laporan keuangan dan *sustainability report* dalam website perusahaan <http://www.itmg.co.id/id> atau melalui website Bursa Efek Indonesia. Indo Tambangraya Megah Tbk selalu tepat waktu dalam mempublikasikan setiap laporannya baik itu laporan tahunan maupun laporan kuartalan. Tidak hanya laporan tersebut, seluruh kebijakan yang disepakati dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham sudah tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan di laporan tahunan.

Tabel 4.4
Rapat Dewan Komisaris ITM 2013

Nama Name	Rapat Komisaris yang Dihadiri Direksi BOC Meeting which Attended by BOD	Rapat Komisaris BOC Meeting	Persentase Percentage
Ibrahim Yusuf	14	1	100
Lukmanul Hakim	14	1	100
Rudijanto Boentoro	14	1	100
Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak	14	1	100
Somruedee Chaimongkol	14	1	100
Somyot Ruchirawat	14	1	100

(Sumber : *Sustainability Report ITM tahun 2013*)

Indo Tambangraya Megah Tbk berkomitmen untuk menjalankan prinsip tata kelola perusahaan dengan prinsip keterbukaan untuk memenuhi ketentuan yang diwajibkan bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), ketentuan, regulasi dan pedoman yang ditetapkan oleh BEI dan Badan Pengawas Pasar Modal, serta Self-Regulatory Organization.

Sebagai bentuk partisipasi langsung dalam hal transparansi, ITM membuat sebuah fasilitas yang dinamakan *Transparency Centre*.

“ITM membentuk Transparency Center sebagai fasilitas untuk melaporkan aktivitas pemberian atau penerimaan hadiah, tanda balas jasa, atau hiburan dan tindakan-tindakan yang berpotensi menyebabkan benturan kepentingan, sehingga kejadian-kejadian seperti itu dapat dihindari. Transparency Center diaktifkan pada tanggal 9 September 2013 pada platform intranet ITM, dan dijelaskan lebih lanjut berikut ini.” (Laporan Tahunan ITM 2013, halaman 194)

Transparency Centre ini dibuat oleh ITM mengingat ITM sendiri mengakui dunia bisnis tidak terlepas dari adanya budaya keramahtamahan, seperti

pemberian hadiah yang sifatnya kecil atau jamuan makan yang tidak termasuk uang tunai atau setaranya. Budaya keramahmatan ini menjadi hal yang cukup lumrah dan dapat dimengerti demi alasan nama baik, menunjukkan niat baik dan menciptakan rasa percaya antara pihak berkepentingan. Perusahaan ITM telah mengatus batasan nilai wajar sebagai pedoman bagi seluruh warga ITM dalam *SOP Anti-Bribery & Corruption*. Sejak peluncurannya, *Transparency Centre* telah menerima lebih dari 50 laporan dari para karyawan ITM di seluruh daerah operasionalnya.

“Portal CG. Untuk memfasilitasi semua insan ITM untuk mendapatkan informasi terkait data perusahaan dan isu-isu GCG, tersedia Portal CG pada intranet perusahaan yang dapat diakses oleh semua karyawan di semua lokasi untuk mempelajari lebih banyak mengenai GCG.” (Laporan Tahunan ITM 2013, halaman 194)

Pemanfaatan teknologi informasi juga dilakukan ITM dengan membuat Portal CG. Hal ini menunjang para karyawan untuk mengakses dan mempelajari lebih banyak mengenai tata kelola perusahaan yang baik.

4.2.1.2 Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas sebuah perusahaan erat kaitannya dengan struktur organisasi yang terdapat di perusahaan tersebut. Struktur organisasi tentu memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam prakteknya.

Permasalahan utama yang dihadapi seringkali merujuk pada siapa yang berada dalam posisi tertentu, apa latar belakang orang tersebut, kesesuaian

kompetensi diri orang tersebut dengan tugas jabatan yang diemban serta kinerja yang terukur selama seseorang menjabat posisi tersebut.

ITM memiliki struktur dalam tatanan tata kelola perusahaan, yakni sebagai berikut :

Gambar 4.3

Struktur Tata Kelola Perusahaan di ITM



(Sumber : Laporan Tahunan ITM 2013)

Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kedudukan tertinggi sebagai forum bertemunya pihak internal perusahaan dengan pemegang saham perusahaan. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) biasanya membahas struktur dewan komisaris maupun dewan direksi, pembahasan kebijakan perusahaan, masalah yang terjadi dalam perusahaan, pengumuman tentang pembagian dividen, kinerja perusahaan dan sebagainya.

Dibawah Rapat Umum Pemegang Saham terdapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagai organ perusahaan. Masa jabatan dewan komisaris dan Dewan Direksi ITM adalah 3 tahun. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberi saran kepada Direksi dalam hal pengelolaan dan strategi perusahaan dalam menerapkan GCG. Tentu saja pengelolaan secara langsung bukan menjadi tugas dari Dewan Komisaris melainkan Dewan Direksi. Berdasarkan Pasal 13 dari Peraturan Menteri Negara BUMN : PER-01/MBU/2011 , komposisi Dewan Komisaris Independen setidaknya 20% dari jumlah Dewan Komisaris yang ada. Diketahui, dua dari enam anggota Dewan Komisaris ITM adalah Komisaris Independen, hal ini menunjukkan bahwa ITM telah memenuhi peraturan bahwa tingkat independensi dewan komisaris sebesar 33%. Selain itu, berdasarkan Pasal 14 dari Peraturan Menteri Negara BUMN : PER-01/MBU/2011, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan. Sepanjang tahun 2013, Dewan Komisaris ITM mengadakan rapat sebanyak 15 kali dimana satu kali rapat yang hanya dihadiri dewan Komisaris dan 14 kali rapat dihadiri Dewan Direksi atas permintaan Dewan Komisaris. Dewan Direksi ditentukan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Direksi ITM adalah menjalankan operasional sehari-hari perusahaan, untuk kepentingan perusahaan dan sejalan dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Dewan Direksi membawahi 3 badan penunjang

yakni Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan Kepatuhan & Manajemen Resiko.

Fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan sendiri oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa komite diantaranya Komite Audit dan Komite Tata Kelola Perusahaan, Nominasi & Kompensasi. Komite Audit dibentuk seturut dengan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang dikenal sebagai OJK) No.29-PM/2004. Masa jabatan komite audit adalah selama 3 tahun. Tanggung jawab utama komite audit antara lain meninjau laporan keuangan Perusahaan, menilai kecukupan pengendalian internal perusahaan dan sistem manajemen risikonya, memastikan bahwa perusahaan telah sepatutnya mematuhi undang-undang dan peraturan terkait mempersiapkan laporan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris untuk disetujui atau diajukan ke RUPS sebagaimana diperlukan. Sepanjang tahun 2013, Komite Audit melakukan rapat sebanyak 4 kali.

Komite Tata Kelola Perusahaan, Nominasi & Kompensasi (KTKPNK) terdiri dari 4 (empat) orang dan memiliki masa jabatan selama 3 tahun. Selama tahun 2013, peranan KTKPNK menghasilkan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait paket remunerasi bagi dewan komisaris dan pembayaran bonus bagi karyawan, rekomendasi kenaikan anggaran gaji, peninjauan praktek tata kelola perusahaan, merekomendasikan pembentukan *Transparency Centre* dan lainnya. KTKPNK melakukan rapat sebanyak 4 kali dalam setahun.

Dalam persoalan *whistleblowing*, ITM telah merumuskan sebuah Kebijakan dan Sitem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing Policy and System – WBS*) pada tahun 2011 dan dimulai dengan fasilitas *Independent Whistle Blower Centre (IWBC)*. Melalui fasilitas ini, para karyawan atau pihak ketiga dapat memberi keluhan/laporan terkait pelanggaran etika dan hukum secara rahasia tanpa merasa takut menerima pembalasan. ITM juga memberikan perlindungan bagi pelapor selama satu tahun sejak ia melaporkan kejadian pelanggaran dan perlindungan ini tidak berlaku lagi jika pelapor memutuskan mencari perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui mekanisme IWBC antara lain:

1. Korupsi;
2. Praktik Tak Wajar;
3. Ketidakjujuran;
4. Pelanggaran hukum (termasuk mencuri, kekerasan terhadap karyawan dan atasan, surat kaleng, penggunaan narkoba, pelecehan, dan tindak kriminal lainnya);
5. Penghindaran pajak dan/atau peraturan lainnya (lingkungan, *mark-up*, *under invoice*, ketenagakerjaan, dll);
6. Pelanggaran Aturan Perilaku Perusahaan dan norma-norma kepatutan lainnya yang standar;
7. Keselamatan kerja, keamanan, dan pelanggaran kesehatan;



8. Tindakan yang dapat menyebabkan kerugian baik finansial maupun non-finansial bagi Perusahaan atau yang dapat mengganggu kepentingan Perusahaan;
9. Pelanggaran Prosedur Operasional Standar di perusahaan, khususnya yang terkait pengadaan barang dan jasa, penawaran manfaat dan remunerasi;
10. Suap; dan
11. Pelanggaran terkait pelaporan keuangan.

4.2.1.3 **Responsibilitas (*Responsibility*)**

Salah satu tanggung jawab perusahaan berhubungan dengan sistem pengendalian internal (SPI) perusahaan. Sistem pengendalian internal ITM menjadi salah satu tanggung jawab utama dari Audit Internal yang bertanggung jawab pada Dewan Direksi. Audit internal inilah yang menelaah dan mengevaluasi apakah aktivitas perusahaan sudah berjalan sesuai dengan sistem pengendalian internalnya.

“Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran ini, Audit Internal menerapkan konsep pengendalian sesuai kerangka kerja COSO dalam menentukan sasaran audit. Metodologi audit berbasis risiko telah diterapkan dalam pengembangan rencana audit tahunan sejak 2004. Metodologi ini akan terus digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi sistem manajemen risiko Perusahaan.” (Laporan Tahunan ITM 2013, halaman 175)

Selain tanggung jawab perusahaan akan sistem pengendalian internal, berdasarkan Pedoman Umum Kebijakan Governance tahun 2006, tanggung jawab perusahaan erat kaitannya pada kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

“Sepanjang tahun 2013, Program ITM untuk Pendidikan telah melaksanakan program Cerdas Ajar di seluruh wilayah operasi tambang ITM. Kegiatan ini merupakan upaya nyata untuk membantu guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun Sekolah Dasar (SD) di sekitar wilayah operasional ITM untuk memperoleh akses pengetahuan mengenai penggunaan kurikulum 2013, cara belajar dan mengajar kreatif, serta pendidikan karakter anak.” (Laporan tahunan ITM 2013, halaman 206)

Tanggung jawab perusahaan erat kaitannya untuk senantiasa menjaga keselamatan dan kesehatan kerja sumber daya manusia di dalamnya.

“Salah satu upaya meningkatkan kinerja keselamatan kerja, yang diukur berdasarkan angka-angka yang dijabarkan di, adalah dengan mendorong terlaksananya Program Akuntabilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SHE-AP). Hal ini selaras dengan sasaran dari Safety Culture Roadmap yang ada. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan keterlibatan secara proaktif dari setiap tingkat pengawasan dengan membudayakan observasi tingkah laku, inspeksi tempat kerja, dan komunikasi yang positif.” (Laporan tahunan ITM 2013, halaman 222)

4.2.1.4 Independensi (*Independency*)

Dalam struktur tata kelola perusahaan, independensi ditunjukkan melalui larangan Dewan Komisaris untuk turut berpartisipasi dalam mengambil

keputusan operasional. Terdapat pula persyaratan Komisaris Independen yang mengharuskan untuk tidak terafiliasi dalam cara apapun dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota lain dari Dewan Komisaris atau Direksi baik secara horizontal maupun vertikal dan sebagainya. Bukti adanya hubungan afiliasi atau tidak dilihat dalam profil dewan direksi maupun dewan komisaris sebagai berikut:

Gambar 4.4
Profil Komisaris ITM

Ibrahim Yusuf Komisaris Utama (Independen)/President Commissioner (Independent)		Somruedee Chaimongkol Komisaris/Commissioner	
Usia/Age	68 tahun/years old	Usia/Age	52 tahun/years old
Warganegara Citizenship	Indonesia Indonesian	Warganegara Citizenship	Thailand Thai
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali Legal Basis of Initial Appointment	Akta No. 18 tertanggal 17 April 2009 Deed No. 18 dated 17 April 2009	Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali Legal Basis of Initial Appointment	Akta No. 33 tertanggal 27 Juli 2007 Deed No. 33 dated 27 July 2007
Riwayat Jabatan di Perusahaan Positions held at the Company	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama (Independen)/President Commissioner (Independent), PT Indo Tambangraya Megah Tbk, 2010 - sekarang/present Komisaris Independen/Independent Commissioner, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, 2009 - 2010 	Riwayat Jabatan di Perusahaan Positions held at the Company	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris/Commissioner, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, 2007 - sekarang/present Director, Banpu Singapore Pte. Ltd., Banpu Minerals Company Ltd., Banpu International Ltd., Silamani Corp. Ltd., Silamani Marble Company Ltd., Banpu China Pte. Ltd., 2007 - sekarang/present Chief Financial Officer, Banpu Public Company Limited, 1999 - sekarang/present
Pengalaman Kerja di Luar Perusahaan Employment History	<ul style="list-style-type: none"> Chairman, Nobel Capital Resources Asia Chairman of Executive Board, Indonesian Council on World Affairs 	Riwayat Pendidikan Education	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Akuntansi/Bachelor of Accounting, Bangkok University, Thailand Program for Global Leadership, Harvard University Graduate School of Business Administration, US Director Certification Program, Thai Institute of Directors Association, Thailand
Riwayat Pendidikan Education	<ul style="list-style-type: none"> Gajah Mada University, Jogjakarta Asian Institute of Journalism, Manila National Resilience (Lemhannas), Jakarta 	Hubungan Afiliasi Affiliation	Beraliliasi dengan pemegang saham pengendali Affiliated with controlling shareholders
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak Ada None		

(Sumber : Laporan Tahunan ITM 2013)

Selain itu, dapat dilihat dari salah satu kinerja Sekretaris Perusahaan yang membentuk Transparency Center untuk melakukan pemantauan penerimaan dan pemberian hadiah dan hiburan serta transaksi yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.

4.2.1.5 Kewajaran (*Fairness*)

Berbicara mengenai kewajaran atau kesetaraan, erat kaitannya dengan persoalan sumber daya manusia mulai dari rekrutmen, keterlibatan karyawan, pelatihan dan pengembangan dan memastikan kesejahteraan karyawan. Sepanjang tahun 2013, ITM melakukan rekrutmen 126 orang dari 5 universitas negeri terkemuka. Beberapa karyawan yang direkrut sebelumnya adalah penerima beasiswa hasil kegiatan CSR dari ITM.

Proporsi SDM yang berasal dari dalam negeri sebesar 3042 orang lebih besar dari 102 orang yang berasal dari luar negeri.

Sepanjang tahun 2013, ITM telah melaksanakan berbagai cara untuk mengembangkan kualitas SDM-nya, antara lain dengan seminar, lokakarya, pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan instruktif.

“Pada tahun 2013 disusun Roadmap Pelatihan Teknis ITM yang bertujuan untuk menciptakan program-program pelatihan berbasis kompetensi dengan topik-topik yang terstruktur dan sistematis sejalan dengan sistem pengembangan karir yang ada di ITM. Modul-modul pelatihan dalam roadmap ini dikembangkan oleh Subject Matter Expert (SME) internal dan oleh karena itu bahan-bahan dalam modul tersebut telah disesuaikan dengan kegiatan bisnis ITM dan langsung dapat diaplikasikan.”(Laporan tahunan ITM 2013, halaman 78)

4.2.2 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

4.2.2.1 Transparansi (*Transparency*)

Tambang Batubara Bukit Asam Tbk mempublikasikan seluruh laporannya baik itu laporan tahunan, laporan keuangan dan *sustainability report* dalam website perusahaan <http://www.ptba.co.id/id/home> atau

melalui website Bursa Efek Indonesia. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk selalu tepat waktu dalam mempublikasikan setiap laporannya baik itu laporan tahunan maupun laporan kuartalan. Tidak hanya laporan tersebut, seluruh kebijakan yang disepakati dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham sudah tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan di laporan tahunan.

“Perseroan memberi kewenangan kepada Sekretaris Perusahaan untuk menjalankan tugas dan peranannya menerapkan asas transparansi. Informasi mengenai Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan (Audited) dan rencana pengembangan Perseroan yang material dapat diakses oleh pemangku kepentingan, investor dan masyarakat melalui website Perseroan www.ptba.co.id.” (Laporan tahunan PTBA 2013, halaman 140)

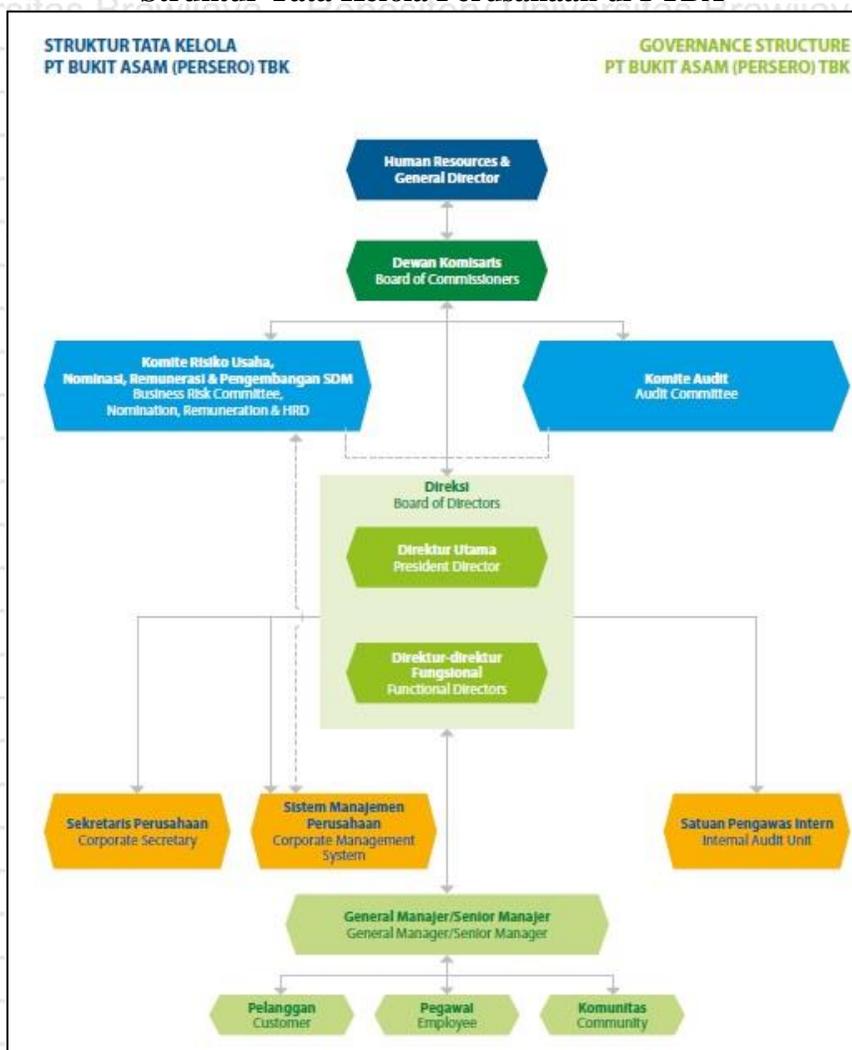
Dalam hal keterbukaan atau transparansi, seperti dikemukakan kutipan di atas, Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting untuk memastikan kelancaran hubungan antar organ Perseroan, hubungan antara perseroan dengan pemangku kepentingan serta dipenuinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi utama Sekretaris Perusahaan dalam perusahaan PTBA adalah sebagai *liason officer, compliance officer, serta investors officer*. Segala bentuk laporan baik itu laporan yang sifatnya tahunan maupun setiap rekap publikasi baik publikasi pers, penataan administrasi dan penataan dokumen telah dilakukan oleh PTBA. Hal ini menjamin keterbukaan dokumen yang memang boleh diketahui oleh publik.

4.2.2.2 Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas sebuah perusahaan erat kaitannya dengan struktur organisasi yang terdapat di perusahaan tersebut. Struktur organisasi tentu memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam prakteknya. Permasalahan utama yang dihadapi seringkali merujuk pada siapa yang berada dalam posisi tertentu, apa latar belakang orang tersebut, kesesuaian kompetensi diri orang tersebut dengan tugas jabatan yang diemban serta kinerja yang terukur selama seseorang menjabat posisi tersebut.

ITM memiliki struktur dalam tatanan tata kelola perusahaan, yakni sebagai berikut :

Gambar 4.5
Struktur Tata Kelola Perusahaan di PTBA





“Perseroan memperkenalkan 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas kepada jajarannya, yakni:

- **Akuntabilitas Individu**, yang melekat kepada hubungan antara pimpinan dengan bawahan dan berlaku kepada kedua belah pihak. Diantaranya adalah pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai yang dilaksanakan setiap semester.
- **Akuntabilitas Kelompok**, yang melekat kepada kelompok yang harus ditanggung bersama atas kondisi dan kinerja yang tercapai. Diantaranya adalah pelaksanaan sistem manajemen kinerja Balance Scorecard di Perseroan, terdapat pengukuran kinerja (KPI) satuan kerja yang dilakukan pengukuran per triwulan dan tahunan.
- **Akuntabilitas Korporat**, yang melekat kepada Perseroan secara menyeluruh dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai Anggaran Dasar. Diantaranya adalah pelaksanaan sistem manajemen kinerja Balance Scorecard di Perseroan dan pengukuran kinerja (KPI) untuk kinerja Korporat yang dilakukan per triwulan dan tahunan.” (Laporan tahunan PTBA 2013, halaman 140)

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan Anggaran Dasar. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan perseoran, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dan lain-lain.

Dibawah Rapat Umum Pemegang Saham terdapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagai organ perusahaan. Masa jabatan dewan komisaris dan dewan direksi adalah 5 tahun. Berdasarkan Pasal 13 dari Peraturan



Menteri Negara BUMN : PER-01/MBU/2011 , komposisi Dewan Komisaris Independen setidaknya 20% dari jumlah Dewan Komisaris yang ada. Diketahui, dua dari enam anggota dewan komisaris PTBA adalah komisaris independen, hal ini menunjukkan bahwa ITM telah memenuhi peraturan bahwa tingkat independensi dewan komisaris sebesar 33%. .Komisaris independen tidak memiliki hubungan usaha apapun maupun hubungan afiliasi dan terdapat anggota komisaris independen yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan, untuk menjamin kompetensi pengawasan bidang keuangan perseroan. Pada perusahaan PTBA, Dewan Komisaris terbagi menjadi beberapa bidang, diantaranya bidang keuangan, bidang produksi, bidang pemasaran, bidang sumber daya manusia, bidang pengembangan usaha, dan bidang tata kelola.

Dewan Direksi ditentukan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Direksi ITM adalah bersama-sama mengelola perseoran agar seluruh sumber daya yang dimiliki dapat berfungsi optimal, profitabilitas meningkat sehingga meningkatkan nilai perseroan secara berkelanjutan. Dewan Direksi PTBA terdiri dari 1 orang sebagai Direktur Utama, dan 5 lainnya menjabat direktur sesuai bidang masing-masing. Kelima bidang tersebut dijabat sebagai Direktur Keuangan, Direktur Operasi/Produksi, Direktur Pengembangan Usaha, Direktur Niaga dan Direktur SDM&Umum. Dewan Direksi membawahi 3 badan penunjang yakni Sekretaris Perusahaan, Sistem Manajemen Perusahaan dan Satuan Pengawas Intern.

Fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan sendiri oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa komite diantaranya Komite Audit dan Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM.

Komite Audit dibentuk seturut dengan Keputusan Badan Pengawas Pasar

Modal (sekarang dikenal sebagai OJK) No.29-PM/2004. Masa jabatan

komite audit adalah selama 3 tahun. Tanggung jawab utama komite audit

antara lain memastikan kewajaran laporan keuangan perusahaan yang

disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, memastikan

dilaksanakannya struktur pengendalian internal perusahaan dengan baik,

memastikan audit internal dan eksternal dilakukan sesuai standar audit yang

berlaku dan memastikan tindak lanjut temuan audit telah dilaksanakan oleh

manajemen. Sepanjang tahun 2013, Komite Audit melakukan rapat sebanyak

57 kali.

Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM

(KRU dan NR-PSDM) memiliki masa jabatan selama 3 tahun. Dalam bidang

risiko usaha, komite ini melakukan kajian atas berbagai resiko yang dihadapi

oleh perseoran dan memberikan rekomendasi sistem manajemen risiko yang

diterapkan oleh direksi. Selain itu, komite ini juga melakukan pemantauan

periode pasca tambang apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan apakah ada risiko yang mungkin terjadi selama

periode pasca-tambang tersebut. Dalam bidang nominasi, remunerasi dan

pengembangan SDM, komite ini memberikan evaluasi, rekomendasi,

informasi terkait sistem pengajaran, pemberian tunjangan, dana pensiun, bonus, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

4.2.2.3 Responsibilitas (*Responsibility*)

Salah satu tanggung jawab perusahaan berhubungan dengan sistem pengendalian internal (SPI) perusahaan. Sistem pengendalian internal PTBA menjadi salah satu tanggung jawab utama dari Sistem Manajemen Perusahaan yang bertanggung jawab pada Dewan Direksi. Sistem manajemen perusahaan inilah yang menelaah dan mengevaluasi apakah aktivitas perusahaan sudah berjalan sesuai dengan sistem pengendalian internalnya. Sistem manajemen perusahaan sendiri terdiri dari Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen K3. Ruang lingkup pengendalian internal, termasuk di dalamnya tata kelola perusahaan menjadi bagian dari tanggung jawab Satuan Pengawas Intern (SPI). SPI kemudian berkordinasi dengan Komite Audit dan menjadi mitra kerja dengan auditor eksternal selama proses audit tengah berlangsung. SPI inilah yang memiliki hubungan dengan afiliasi, anak perusahaan dan yayasan milik perseroan dalam bentuk koordinasi pelaksanaan audit dan bantuan teknis.

“Prinsip responsibilitas diterapkan dengan senantiasa menerapkan dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, mengelola lingkungan bekas tambang dengan baik, melaksanakan kewajiban timbal-balik terhadap para mitra bisnis dan merancang serta melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab terhadap karyawan, sebagai mitra strategis utama perseroan, dilaksanakan melalui pembinaan, peningkatan

kompetensi dan pemberian paket remunerasi yang sebanding dengan kinerjanya.”(Laporan tahunan PTBA 2013,halaman 141)

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan akan lingkungan eksternal perusahaan, maka PTBA mencanangkan 5 Sinergi Program dengan berbagai kegiatan yang termasuk di dalamnya, antara lain :

a. Peduli Ummat

Perbaiki sarana ibadah, bantuan perlengkapan ibadah, safari guru agama.

Tujuan : meningkatkan kualitas sarana ibadah, meningkatkan semangat belajar agama, mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, aman, kondusif, dan agamis.

b. Cinta Sekolah

Perbaiki sarana sekolah, bantuan perlengkapan sekolah

Tujuan : meningkatkan kualitas sarana sekolah, meningkatkan semangat belajar para siswa

c. Peduli Masyarakat

Pembuatan jalan setapak dan siring, perbaikan dermaga, jembatan, kantor desa, pembangunan gedung serba guna, pasar, MCK umum, Check Dam, penambahan fasilitas objek wisata.

Tujuan : mendukung kelangsungan hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat



d. Teranglah Desaku

Penyediaan Listrik Mandiri Rakyat, Mikrohido, pemasangan lampu jalan dan lampu hias.

Tujuan : membantu desa-desa yang masih mengalami krisis listrik, mendukung terwujudnya lingkungan kota/desa yang indah dan asri.

e. PTBA Green & Clean

Pembangunan TPA, bantuan bak sampah, pembangunan tanah hijau.

Tujuan : meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengolah sampah, menambah ruang terbuka hijau, mendukung terwujudnya lingkungan yang asri, bersih dan sehat.

4.2.2.4 Independensi (*Independency*)

Dalam struktur tata kelola perusahaan, independensi ditunjukkan melalui larangan Dewan Komisaris untuk turut berpartisipasi dalam mengambil keputusan operasional. Terdapat pula persyaratan Komisaris Independen yang mengharuskan untuk tidak terafiliasi dalam cara apapun dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota lain dari Dewan Komisaris atau Direksi baik secara horizontal maupun vertikal dan sebagainya. Bukti adanya hubungan afiliasi atau tidak dilihat dalam profil dewan direksi maupun dewan komisaris. Dan dari keseluruhan pimpinan dan anggota dalam jajaran Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi PTBA, tidak ada satupun yang memiliki hubungan afiliasi dengan pihak manapun.

Gambar 4.6
Salah Satu Profil Dewan Komisaris

Agus Suhartono, SE
Komisaris Utama/Independen
President Commissioner/Independent

Lahir di Blitar, Jawa Timur, 25 Agustus 1955, Agus Suhartono adalah purnawirawan Laksamana TNI lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) Bagian Laut (sekarang Akademi TNI Angkatan Laut) tahun 1978. Menjalani berbagai pendidikan kedinasan diantaranya Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI AL (1994), Sesko TNI (1999), Kursus Lemhanas (2003) dan kursus Maritime Force Commander, Hawaii (2006). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Merdeka Surabaya tahun 1998. Berbagai penugasan penting sebagai perwira TNI AL telah dilaluinya, diantaranya sebagai Panglima Armada Barat (2007-2008), Asisten Operasi, lalu Asisten Perencanaan dan Anggaran KSAL (2008-2009), Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan (2009), Kepala Staf TNI Angkatan Laut (2009-2010), dan Panglima TNI (2010-2013). Ditunjuk sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 10 Oktober 2013.

Usia per 31 Desember 2013 adalah 58 tahun. Dasar hukum penunjukan sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Bukit Asam (Persero) Tbk adalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) tanggal 10 Oktober 2013. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Komisaris lainnya, Direksi maupun pemegang saham.

(Sumber: Laporan tahunan ITM 2013)

“Prinsip independensi diterapkan dengan penyusunan dan penerapan code of conduct dan pengaturan seluruh transaksi maupun rencana investasi yang mengandung atau berpotensi mengandung benturan kepentingan (conflict of interest). Dengan pengaturan ini maka seluruh organ Perseroan akan melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan mengutamakan independensi dan obyektivitas serta saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing pihak.” (Laporan tahunan PTBA 2013, halaman 141)

4.2.2.5 Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kewajaran atau *fairness* diterapkan PTBA pada saat RUPS berlangsung. Setiap keputusan penting di dalam RUPS diambil melalui voting yang dapat diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir atau perwakilannya yang sah sesuai ketentuan. Seluruh pemegang saham juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai topik yang dibahas dan memiliki hak untuk mendapat jawaban. Bagi pemegang saham minoritas tetap diperhatikan kepentingannya dalam pengambilan keputusan atau penyampaian gagasan dengan mekanisme tertentu.

“Perseroan menerapkan asas kesetaraan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban (equal treatment) yang diberikan kepada dan oleh Perseroan. Perseroan membuka akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan bagi kemajuan Perseroan. Selain itu, dalam pelaksanaan prinsip kesetaraan, Perseroan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.”(Laporan tahunan PTBA 2013, halaman 141)

Lain halnya dengan kesetaraan atau kewajaran dalam RUPS, pembahasan sumber daya manusia berawal dari rekrutmen, pengelolaan kinerja, budaya kerja, strategi remunerasi, pengembangan karir dan pelatihan serta pengembangan. Sepanjang tahun 2013, jumlah karyawan yang diterima sesuai target kebutuhan adalah sebanyak 305 orang yang terdiri dari 218 orang jenjang kelulusan SMA, 64 orang jenjang D3 dan 23 orang jenjang S1.

PTBA memiliki keunikan dalam memilih dan memilah pekerjaan

berdasarkan kompetensi pegawai yang sebenarnya. Perseoran membuat sistem pengembangan pegawai melalui penerapan “*Talent Management*” untuk memperoleh gambaran rinci mengenai ketersediaan dan penempatan pegawai sesuai kebutuhan organisasi. PTBA juga menegaskan tidak ada kebijakan remunerasi yang membedakan perlakuan terhadap karyawan laki-laki dan perempuan di seluruh level jabatan. PTBA melakukan rekrutmen 126 orang dari 5 universitas negeri terkemuka. Beberapa karyawan yang direkrut sebelumnya adalah penerima beasiswa hasil kegiatan CSR dari ITM. Proporsi SDM yang berasal dari dalam negeri sebesar 3042 orang lebih besar dari 102 orang yang berasal dari luar negeri.

Sepanjang tahun 2013, ITM telah melaksanakan berbagai cara untuk mengembangkan kualitas SDM-nya, antara lain dengan seminar, lokakarya, pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan instruktif.

4.3 Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan serta Pengungkapannya berdasarkan *GRI Standard 4*

Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan tertuang dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan berdampak positif terhadap lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat diberikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal adalah orang-orang yang berada di dalam lingkungan perusahaan seperti karyawan perusahaan. Sedangkan, pihak eksternal adalah orang-orang yang berada di luar lingkungan perusahaan seperti

masyarakat. Dampak yang diberikan perusahaan ini dapat berupa dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang.

4.3.1 Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM)

4.3.1.1 Kategori Ekonomi (DMA EC)

Dalam aspek kinerja ekonomi, ITM sudah mencantumkan rincian distribusi nilai ekonomi dalam tabel Ikhtisar Distribusi Nilai Ekonomi.

Pendistribusian nilai ekonomi disebar untuk biaya operasional, gaji karyawan dan benefit lainnya, pembayaran kepada penyandang dana baik itu pemegang saham berupa dividen dan kepada bank berupa bunga pinjaman, serta pengeluaran untuk pemerintah (pajak, royalty, dsb) dan pengeluaran untuk masyarakat. Dari pendistribusian nilai ekonomi, terlihat bahwa kinerja ITM tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pemegang saham namun juga berpengaruh positif kepada pemangku kepentingan lainnya. Akan tetapi, ITM tidak mencantumkan aspek implikasi finansial dan risiko serta peluang jika terjadi perubahan iklim, cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti serta bantuan finansial yang diterima dari pemerintah.

Dalam aspek keberadaan pasar, ITM memastikan besaran upah minimum yang diterima seorang karyawan baru golongan terendah lebih besar dibandingkan upah minimum regional (UMR) atau provinsi (UMP). Namun, dalam hal ini ITM tidak mencantumkan berapa perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi.

Dalam aspek dampak ekonomi tidak langsung, ITM mencantumkan tujuh program utamanya yakni ekonomi lokal, pendidikan, pelayanan kesehatan, sosial budaya keagamaan, lingkungan hidup, hubungan kemasyarakatan dan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi ITM tidak menjelaskan secara rinci mengenai adanya pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang dilakukan. Untuk dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar dikarenakan ITM telah membangun sejumlah saran dan prasarana, antara lain :

1. Pembangunan balai pertemuan desa Danau Redan dan Kantor Desa Sukarahmat di Kutai Timur.
2. Pembangunan Jalan di desa Penarong, Empas, Lotaq, dan Jengan Danum (Kutai Barat), dan jalan di desa Separi, Kertabuana, Embalut, dan Bangun Rejo (Kutai Kartanegara).
3. Pembangunan jembatan di desa Payang (Kutai Barat).

Untuk aspek praktik pengadaan, ITM tidak mencantumkan perbandingan pasti mengenai pembelian dari pemasok local di lokasi operasional, tetapi dapat dipastikan ITM memberikan kesempatan pada usaha kecil dan koperasi setempat termasuk mitra binaannya untuk mengerjakan beberapa bidang jasa tertentu seperti pemasokan jasa boga, penyediaan bibit tanaman penghijauan dan penyediaan pupuk bokashi.

4.3.1.2 Kategori Lingkungan (DMA EN)

Kategori lingkungan dibagi ke dalam 12 aspek, yakni aspek bahan, aspek energi, aspek air, aspek keanekaragaman hayati, aspek emisi, aspek efluen dan limbah, aspek produk dan jasa, aspek kepatuhan, aspek transportasi, aspek lain-lain, aspek pemasok atas lingkungan dan mekanisme pengaduan masalah lingkungan.

Di dalam aspek bahan, ITM telah mencantumkan bahan yang digunakan berdasarkan bobot atau volume. Sebagai contoh, bahan peledak yang digunakan dalam operasional ITM tahun 2013 tercantum dalam satuan kilogram dan satuan biji. Untuk bahan pelumas baik itu oli dan lemak (grease), digunakan bobot atau volume liter dan Kg. dan bahan terakhir yakni kapur, flokulan dan koagulan menggunakan satuan liter dan Kg. Selain bahan operasional ITM juga menggunakan bahan-bahan untuk kegiatan administrasi seperti kertas, kemasan plastik, tinta printer dan sebagainya. Akan tetapi ITM tidak mencantumkan persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang.

Di dalam aspek energi, ITM menggunakan energi demi kepentingan operasional dan juga kepentingan pendukung operasional. Untuk kegiatan operasional, energi utama dipasok melalui BBM dan batubara. Sedangkan untuk energy sekunder berupa tenaga listrik yang dipasok dari PLN ataupun dari pembangkit listrik sendiri. Berdasarkan apa yang disyaratkan dalam GRI G4, ITM telah mencantumkan besarnya konsumsi energi dalam perusahaan yang terbagi atas 3 kegiatan yakni Tambang, Pelabuhan, dan

Kontraktor beserta jumlah energi yang terpakai. ITM juga telah mencantumkan adanya pengurangan konsumsi energi dari tahun 2012 ke tahun 2013, dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Pasokan Listrik PLN 2012-2013

Tahun	Jumlah (kWh)
2012	1.372.755
2013	9.937

(sumber : *Sustainability Report ITMG 2013*)

Penggunaan air juga dimanfaatkan oleh ITM untuk beberapa kegiatan usaha, diantaranya, mencuci batubara dengan metode penyemprotan, penyemprotan areal transportasi dan *crushing* untuk mengurangi debi, pendinginan dan bahan baku PLTU berbahan bakar batubara serta untuk keperluan kebersihan (MCK) baik di lapangan maupun wilayah kantor operasional. Penggunaan air sudah dicantumkan dalam laporan keberlanjutan dengan terbagi menjadi 2 pengelompokan yaitu air permukaan untuk kegiatan pertambangan dan air permukaan untuk pencucian batubara. Selain air permukaan, ITM juga memanfaatkan air laut untuk keperluan operasional. Sebagai bentuk konservasi akan penggunaan air, ITM menerapkan berbagai pembatasan dan penghematan air. Selain itu, ITM juga melakukan pengolahan Air Asam Tambang (AAT) di kolam pengendap lumpur sebelum dialirkan ke perairan umum.

Kepedulian ITM akan keanekaragaman hayati direalisasikan dalam bentuk pemantauan terhadap beberapa hal, diantaranya:

- a. Pemantauan Biota Air di sekitar lokasi pelabuhan sekaligus menunjukkan kualitas air yang semakin baik dan mendukung biota perairan.
- b. Pemantauan Satwa Liar yang telah direhabilitasi dan direvegetasi untuk mendukung satwa liar.
- c. Pemantauan revegetasi berkaitan erat dengan kegiatan penanaman dan dengan berjalannya waktu, tingkat keberhasilan tumbuh tanaman diatas 80% sementara kegiatan perawatan perlu semakin ditingkatkan.
- d. Pemantauan Sosial Ekonomi dan Budaya (SOSEKBUD) menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan telah sesuai dengan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tertuang dalam dokumen AMDAL.

Dari 6 (enam) wilayah operasional ITM, ada yang berada dalam kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi dengan status seluruhnya memiliki izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dikeluarkan Menteri Kehutanan. ITM mengklasifikasikan keanekaragaman hayati langka yang ditemukan di areal kelolaan dalam tabel IUCN Red List berdasarkan kategorinya baik itu *extinct in the wild*, *critically endangered*, *endangered* dan *vulnerable*. Hal ini adalah upaya ITM untuk terus menerapkan konsep pertambangan yang meminimalisasi kerusakan dan turut berperan dalam upaya pelestarian lingkungan.

Sumber utama emisi dari operasional ITM adalah penggunaan bahan bakar (solar dan bensin) serta pembangkit listrik berbahan bakar batubara.

Pada *sustainability report* ITM tahun 2013, ITM mencantumkan tabel perkiraan emisi CO2 periode 2012 dan periode 2013 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Pengendalian Emisi

Sumber Emisi CO2	2012	2013
Cakupan 1 (Penggunaan Bahan Bakar)	1.237.915,33	1.116.988,08
Cakupan 1 (Penggunaan Bahan Bakar untuk PLTU)	60.651,80	59.209,40
Cakupan 2 (Penggunaan Listrik)	2.273,67	1.016,75
TOTAL	1.300.840,80	1.177.214,23

(sumber : *Sustainability Report ITMG 2013*)

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwan penggunaan bahan bakar oleh ITM masuk ke dalam cakupan 1 dan cakupan 2 seperti yang disyaratkan oleh GRI G4. Dan jumlah emisi gas rumah kaca dari tahun 2012 sampai 2013 berkurang sebesar 123.626,57 . Namun, dalam aspek emisi, ITM tidak mencantumkan intensitas emisi gas rumah kaca, jumlah pengurangan emisi gas rumah kaca dan apa saja emisi bahan perusak ozon.

Aspek selanjutnya dalam kategori lingkungan adalah aspek efluen dan limbah. Jenis limbah yang ada di ITM adalah limbah padat, limbah cari dan limbah B3. Pada *sustainability report* ITM tahun 2013, ITM menjelaskan secara ringkas bagaimana limbah ini diolah berdasarkan jenisnya. Contoh salah satu pengolahan limbah padat anatra lain material-material yang masih bernilai ekonomi dimanfaatkan, sedangkan yang tidak bernilai ekonomis ditimbun di penimbunan khusus. Bahan-bahan yang dapat digunakan kembali contohnya spareparts bekas, *conveyor* bekas, dan lainnya. Kebijakan

3R dibuat oleh ITM untuk mengelola dan mengolah limbah, 3R yang dimaksud antara lain :

1. *Reduce*: berupaya mengurangi jumlah limbah melalui penerapan efisiensi operasional.
2. *Reuse*: berupaya menggunakan kembali barang-barang bekas pakai.
3. *Recycle*: berupaya melakukan daur ulang, dilaksanakan sendiri maupun diserahkan kepada pihak yang berkompeten.

Namun, dalam aspek efluen dan limbah, ITM tidak mencantumkan bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel 2 dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional, serta tidak dicantumkan keanekaragaman hayati air dan habitat terkait yang mungkin terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan organisasi.

Aspek selanjutnya adalah Produk dan Jasa, Kepatuhan, Transportasi dan Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan. Keempat aspek ini tidak dibahas oleh ITM. Beberapa contoh dari indikator yang tidak dibahas antara lain persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori, jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan, nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan serta dampak lingkungan dari pengangkutan produk, barang lain atau bahan untuk operasional ITM.

Dua aspek terakhir yang dibahas oleh ITM dalam kategori lingkungan adalah asesmen pemasok atas lingkungan dan aspek lain-lain. ITM

menyampaikan bahwa dalam seleksi kontraktor baik itu penambangan maupun pengangkutan, ITM menggunakan Sistem Manajemen Kontraktor (CMS) dalam tahapan pre-kualifikasi dan penentuan tender. Sedangkan dalam aspek lain-lain, ITM membuat total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan dengan sebuah grafik sederhana yang menggambarkan biaya lingkungan mengalami peningkatan sebesar 24% dari tahun 2012. Grafik biaya lingkungan ini tidak dijelaskan secara terperinci tetapi dalam bentuk sederhana menggambarkan total biaya-nya saja.

4.3.1.3 Kategori Sosial

Praktek Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja (DMA LA)

Aspek yang pertama adalah pekerjaan, selama tahun 2013, ITM melakukan perekrutan atas 126 karyawan baru dari perekrutan yang dikerjakan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak yang berkompeten. Tingkat *turn over* karyawan sebesar 8.0% dengan total jumlah karyawan keluar sebanyak 258 orang (215 karyawan laki-laki dan 43 karyawan wanita). Penyebab keluarnya karyawan ini umumnya berlatar belakang alasan pribadi dan memasuki masa pensiun. ITM mengelompokkan *turn over* ini hanya berdasarkan gender tidak berdasarkan umur dan wilayah. Namun, terdapat kekurangan dalam pemenuhan aspek ini, ITM tidak mencantumkan besarnya tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, serta tidak

dicantumkan tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender.

Aspek selanjutnya yang dicantumkan oleh ITM dalam *sustainability report* adalah kesehatan dan keselamatan kerja. ITM memiliki Departemen QSE (*Quality, Safety and Environment*) untuk menjamin pelaksanaan peraturan seluruh aspek K3. Untuk memenuhi aspek K3 di setiap kegiatan operasional, Departemen QSE membentuk *Safety Committee* (Komite K3) di setiap *site*. Anggota Komite K3 *site* terdiri dari wakil karyawan di setiap unit. Namun, ITM tidak mencantumkan berapa persentase total tenaga kerja yang menjadi wakil dalam Komite K3. Jenis dan tingkat cedera serta jumlah total kematian akibat kerja telah diungkapkan berdasarkan daerah kerja. Dan dari statistik kejadian kecelakaan kerja, kecelakaan major (serius) meningkat sebesar 83% dan kecelakaan minor juga meningkat sebesar 33% jika dibandingkan dengan data tahun 2012. Kejadian kecelakaan kerja diungkapkan ITM dalam beberapa grafik berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi no. 555K.

Aspek berikutnya, adalah aspek pelatihan dan pendidikan. Sepanjang tahun 2013, ITM melakukan beberapa jenis pelatihan dalam bentuk lokakarya formal, pembelajaran diri, sesi berbagi informasi atau pengetahuan, dan pelatihan sambil bekerja melalui pendampingan dari *supervisor* masing-masing unit kerja. Berikut adalah tabel jumlah pelatihan dan jam pelatihan menurut gender dan lokasi kerja:



Tabel 4.7
Jumlah Pelatihan dan Jam Pelatihan Karyawan

Jumlah pelatihan dan Jam Pelatihan menurut gender dan lokasi kerja.

Reporting the total training hour	2013		2012	
	Learning Hours	Training Amount	Learning Hours	Training Amount
Usia				
≤ 25 tahun	2.346	219	1.854	165
26-40 tahun	16.780	1.430	30.521	2.053
41-55 tahun	7.182	512	12.650	768
≥ 55 tahun	279	19	468	20
Gender				
Laki-laki	22.824	1.844	45.492	2.652
Perempuan	3.763	336	45.119	355
Perusahaan				
Trubaindo Coal Mining	1.413	532	4.820	337
Bharinto Ekatama	437	109	748	59
Balikipapan Office	951	76	892	46
Jakarta Office	3618	277	1.765	166
Kitadin Embalut	6.686	428	5.698	342
Kitadin Tandung Mayang	573	33	12.076	878
Jorong Barutama Greston	740	146	2.481	396
Indominco Mandiri*)	11.937	579	17.416	782

(sumber : Sustainability Report ITMG 2013)

Untuk tahun 2013, ITM telah melakukan pengukuran kompetensi terhadap 844 karyawan. Selanjutnya, ITM merealisasikan proses promosi dan rotasi terhadap sejumlah karyawan atas prestasi kerja yang ditunjukkan, yakni 433 karyawan mengalami promosi dan 89 karyawan rotasi.

Sustainability Report ITM tahun 2013, tidak mencantumkan beberapa aspek seharusnya ada dalam kategori Praktek Ketenagakerjaan dan Kenyamanan bekerja. Aspek yang seharusnya ada antara lain hubungan industrial, keberagaman dan kesetaraan peluang, kesetaraan remunerasi

perempuan dan laki-laki, asesmen pemasok atas praktik ketenagakerjaan serta mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan.

Hak Asasi Manusia (DMA HR)

Berdasarkan GRI G4, dalam kategori hak asasi manusia terdapat 10 aspek yang harus diungkapkan. Kesepuluh aspek ini antara lain investasi, non-diskriminasi, kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, pekerja anak, pekerja paksa atau wajib kerja, praktik pengamanan, hak adat, asesmen, asesmen pemasok atas hak asasi manusia dan mekanismen pengaduan masalah hak asasi manusia. Dari kesepuluh aspek tersebut, tidak ada satupun aspek dari kategori hak asasi manusia yang diungkapkan dalam *sustainability report* ITM tahun 2013.

Masyarakat (DMA HR)

Aspek pertama yang akan dibahas adalah aspek Masyarakat Lokal. Di dalam operasional ITM, kegiatan pertambangan yang dilakukan selalu berlangsung pada lahan yang relatif luas. Hal ini tentu bersinggungan dengan masyarakat sekitar. ITM berusaha untuk menjalin hubungan dengan komunitas sekitar dengan turut menyumbangkan kesejahteraan bersama antara perusahaan dan juga masyarakat sekitar. Salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh ITM adalah proyek-proyek infrastruktur yang bersifat fisik demi kelancaran operasional perusahaan dan juga memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Selain itu, ITM juga turut

membantu dalam upaya peningkatan kualitas hidup melalui bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat. Akan tetapi, ITM tidak mencantumkan kegiatan mereka ini dalam bentuk persentase seperti yang disyaratkan dalam GRI G4.

Aspek lainnya yang terdapat dalam kategori masyarakat antara lain anti korupsi, kebijakan publik, anti persaingan, kepatuhan, asesmen pemasok atas dampak terhadap masyarakat, mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat. Keseluruhan aspek di atas tidak diungkapkan oleh ITM dalam *sustainability report* tahun 2013.

Tanggung Jawab Produk (DMA PR)

Produk utama yang dihasilkan oleh ITM adalah batubara. Penanganan batubara membutuhkan area luas dan peralatan berat dalam transportasinya.

ITM mengatur jarak areal pemuatan dengan pemukiman terdekat sesuai standar kesehatan, demikian juga besaran butiran batu bara diatur secara berjenjang selama proses angkut. Untuk mengurangi dampak debu, sepanjang jalur transportasi dilakukan penyemprotan dengan air secara reguler. Untuk evaluasi penanganan batubara terhadap dampak kesehatan, dalam periode tertentu tidak dilakukan sesuai *life cycle product* melainkan sesuai dengan ketentuan standar ISO dan SMK3 yang dijadikan rujukan.

Dalam aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan ITM menjamin hal tersebut sesuai standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan “*Good*

Mining Practice for Quality Assurance". Namun, ITM tidak mencantumkan persentase kategori tersebut, hanya dalam bentuk deskripsi yang dijelaskan.

Untuk aspek kedua yaitu pelabelan produk dan jasa, ITM mengklasifikasikan kedalam kriteria *Platinum* dan *Gold* seperti yang digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8

Kriteria Klasifikasi Pelanggan

Platinum	Gold
(1) \geq USD 10 Juta Gross Profit/ Tahun (Rata-rata 5 tahun)	(1) \geq USD 1 Juta Gross Profit/ Tahun (Rata-rata 5 tahun)
(2) Pembelian Terus Menerus selama 2009-2013	(2) Maksimum kerugian sebanyak satu tahun selama 2009-2013
(3) Tidak ada kerugian selama 2009-2013	(3) \geq USD 5/Ton Gross Profit (@10% IRR sebelum pajak)
(4) \geq USD 10/Ton Gross Profit (@10% IRR sebelum pajak)	(4) \geq 100 k Ton/ Tahun (Rata-rata 5 tahun)
(5) \geq 500 k Ton/ Tahun (Rata-rata 5 tahun)	

(sumber : *Sustainability Report ITMG 2013*)

Sepanjang tahun 2013, belum ada hasil survey yang menjelaskan adanya keluhan dari konsumen terkait pelanggaran privasi konsumen. Dan dalam *sustainability report* ITM tahun 2013, ITM tidak mencantumkan hasil survey yang mengukur kepuasan pelanggan melainkan deskripsi bagaimana ITM membangun kepercayaan pelanggan, pendekatan pemasaran dan klasifikasi pelanggan saja.

Ketiga aspek lainnya yang seharusnya ada dalam kategori tanggung jawab produk dan jasa antara lain komunikasi pemasaran, privasi pelanggan

dan kepatuhan. Namun, ITM tidak membahas atau tidak mengungkapkan ketiga aspek tersebut dalam *sustainability report* miliknya.

4.3.2 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA)

4.3.2.1 Kategori Ekonomi (DMA EC)

Dalam aspek kinerja ekonomi, PTBA yang merupakan salah perusahaan milik negara di bidang pertambangan telah berkontribusi dalam ekonomi negara. Pada 2013, PTBA adalah satu-satunya BUMN batubara yang terdaftar di bursa saham dan membayarkan Rp3,61 triliun untuk pendapatan negara dalam bentuk royalty dan pajak. PTBA juga merupakan pemasok batubara nomor satu bagi pembangkit-pembangkit listrik milik negara yang dikelola Perusahaan Listrik Negara. Selama 3 tahun terakhir, PTBA telah memasok 22.728.832 ton batubara sebagai bahan bakar pembangkit di seluruh Indonesia. Cakupan kewajiban organisasi meliputi operasi penambangan, pengangkutan, dan pelabuhan khusus batubara. Dalam aspek kinerja ekonomi ini, ada 2 aspek yang tidak diungkapkan oleh PTBA yakni implikasi finansial dan resiko serta peluang lainnya pada kegiatan organisasi karena perubahan iklim, dan bantuan finansial yang diterima dari pemerintah.

Aspek kedua dari kategori ekonomi adalah keberadaan pasar. PTBA mengungkapkan bahwa untuk karyawan baru dengan golongan terendah yang bertugas di Tanjung Enim, gaji dan tunjangan yang diberikan adalah sebesar Rp 2.390.000/bulan atau lebih besar 47% dari UMP di Provinsi

Sumatera Selatan yang hanya Rp 1.630.000/bulan. Dan dalam hal pemberian upah, PTBA tidak memperlakukan gender. Proses rekrutmen yang dilakukan melalui beberapa tahap seperti pemenuhan aspek administrasi, attitude test, psikotest, tes eksehatan, dan wawancara. Setelah itu terdapat *pre-employee training* (PET) dan diikuti pelaksanaan program pengembangan bagi pegawai baru yang lolos program.

Aspek ketiga adalah dampak ekonomi tidak langsung. Dampak ekonomi tidak langsung yang diberikan oleh PTBA dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, tidak hanya oleh karyawan PTBA saja. Dampak tersebut tertuang melalui pembayaran royalti, pajak, pembayaran gaji, upah dan kesejahteraan karyawan serta reklamasi lingkungan dan penutupan tambang, untuk besarnya nilai manfaat ekonomi tidak langsung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9

Nilai Manfaat Ekonomi Tidak Langsung

Nilai Manfaat Ekonomi Tidak Langsung		Value Indirect Economic Benefits	
Manfaat Ekonomi	2013	2012	Economic Benefit
Pembayaran Royalti	628.272	714.157	Payments of royalties
Pajak	607.081	1.002.166	Payment for taxes
Gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan	1.270.782	1.281.013	Salaries, wages, and employee benefits
Reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	67.879	59.922	Environmental reclamation And mine closure
Investasi Sosial	88.948	83.254	Social Investment

(su

umber : *Sustainability Report PTBA 2013*)

Aspek terakhir dari kategori Ekonomi adalah praktik pengadaan. PTBA tidak mengungkapkan secara eksplisit bagaimana perusahaan menerima pasokan bahan dari pemasok lokal. Tetapi, perusahaan menjelaskan dari Program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Program Musrenbang),

PTBA melibatkan peran serta masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di lingkaran tambang terutama infrastruktur.

4.3.2.2 Kategori Lingkungan (DMA EN)

Aspek pertama yang dibahas adalah aspek bahan atau material. PTBA mengelompokkan bahan yang dimaksud ke dalam dua kategori yaitu untuk kebutuhan operasional pertambangan dan kebutuhan kantor.

Tabel 4.10
Konsumsi Material Utama

Konsumsi Material Utama					Primary Material Consumption		
ton					ton		
Kegunaan	Deskripsi	2013	2012	2011	2010	Description	Use
Operasional Pertambangan	Grease	0,69	0,78	0,43	0,89	Grease	Mining Operations
	Bahan Peledak	1,192	1,154	1,172	0,605	Explosives	
Kantor	Kertas	0,63	0,67	0,69	0,72	Paper	Office
Jumlah		3,512	2,604	2,292	2,215		Total

(sumber : *Sustainability Report PTBA 2013*)

Upaya PTBA dalam melaksanakan *Green Mining* adalah dengan meminimalisasi konsumsi material dengan menggunakan material yang daur pakai dan daur ulang limbah. Sepanjang tahun 2013, rincian material dari daur ulang dan daur pakai yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11 – Material dari Daur Ulang dan Daur Pakai yang Digunakan

Material dari Daur Ulang dan Daur Pakai yang Digunakan						Re-used and Recycled Materials	
ton						ton	
Kegunaan	Deskripsi	2013	2012	2011	2010	Description	Use
Operasional Pertambangan	Oli Bekas untuk Campuran ANFO ⁷⁾	2,5	1,33	19,80	3,8	Used Oil for ANFO mixture ⁷⁾	
	Belt Rekondisi	27,5	27,5	27,5	8	Refurbished Belt	Mining Operations
	Suku Cadang Rekondisi	97,26	111,15	196,98	128,14	Refurbished Spare Parts	
Jumlah		127,26	139,98	244,28	139,94	Total	

(sumber : *Sustainability Report PTBA 2013*)

Aspek kedua adalah energi. Energi yang dibutuhkan oleh PTBA untuk menunjang kegiatan operasionalnya bersumber dari bahan bakar minyak (solar), batubara untuk PLTU, listrik jaringan PLN, listrik dari tenaga surya dan listrik diekspor dari kelebihan. Dalam *sustainability report* PTBA 2013, PTBA membuat 3 tabel yang terdiri dari konsumsi dan produksi energi PTBA (diklasifikasikan menurut sumber energi dan berapa unit yang terpakai), konsumsi BBM & Listrik PTBA selama kurun waktu 4 tahun terakhir, lalu yang terakhir PTBA menyajikan tabel penghematan BBM & Listrik di unit pertambangan mulai tahun 2010 hingga 2013.

**Tabel 4.12
Penghematan (BBM & Listrik) PTBA**

Penghematan (BBM & Listrik) PTBA		Energy Savings (Fuel Oil and Electricity) of PTBA			
	Unit	2013	2012	2011	2010
Unit Pertambangan Mining Unit	Joule (juta)	254.456.316,61	246.135.896,38	464.778.918,53	63.343.287,12
Catatan Note: Penghematan ini di dapat dari penurunan pemakaian BBM (litr/ton) dan listrik (kWh/Ton) tiap-tiap tahun. These savings were caused by the decrease in fuel consumption (liter/ton) and electricity (kWh/ton) each year.					

(sumber : *Sustainability Report PTBA 2013*)

Dapat dilihat bagaimana dari tahun sebelumnya, PTBA mampu melakukan penghematan BBM & Listrik. Sumber energi tersebut digunakan PTBA untuk peralatan pertambangan, sarana transportasi dan infrastruktur, termasuk kantor dan perumahan PTBA.

Dalam hal konservasi air, PTBA semakin mengurangi pengambilan air dari sungai. PTBA membuat Fasilitas Pengolah Air Bersih (WTP) UPTe Limoa untuk mengolah air tambang per hari yang kemudian diproses menjadi air minum. Selain membuat fasilitas pengolah air bersih, PTBA juga memanfaatkan air hujan dengan cara ditampung untuk aktivitas pencucian peralatan tambang. Sedangkan untuk menjaga kualitas tanah, PTBA membuat biopori dan embung untuk menyimpan air agar tidak langsung mengalir ke sungai.

Tabel 4.13
Konservasi Air yang Dilakukan PTBA

Konservasi Air yang Dilakukan PTBA					Water Conservation Conducted by PTBA
m ³					m ³
Deskripsi	2013	2012	2011	2010	Description
	1.922.712	4.928.948	4.938.568	4.659.237	
Pemanfaatan Air Tambang untuk pembersihan dan penyiraman jalan tambang	3.306.092	2.078.758	1.289.694	793.111	Usage of mine water to clean the mine roads
Pemanfaatan Air Tambang untuk Air bersih dan air Minum	128.616	0	0	0	Usage of mine water for clean and drinking water
Biopori	34.684	11.278	11.099	9.535	Biopori
Jumlah					Total

(sumber : *Sustainability Report PTBA 2013*)

Selanjutnya, adalah aspek keanekaragaman hayati. PTBA menjelaskan bahwa seluruh wilayah operasionalnya sudah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan produksi dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan tidak ada satu area penambangan yang berdekatan dengan kawasan

hutan lindung maupun kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi. Namun, hal itu tidak menjadikan PTBA sembarangan dalam menjaga lingkungan sekitar. PTBA bekerja sama dengan beberapa universitas dan dinas kehutanan terkait dengan pemantauan terhadap lingkungan maupun beragam spesies hewan yang ada di sekitar kawasan PTBA. Beberapa spesies fauna yang dilindungi dan dipantau oleh PTBA, antara lain :

Tabel 4.14
Spesies Fauna yang Dipantau

Spesies Fauna Dilindungi yang Dipantau [G4-EN14]			Fauna Monitoring Results
Nama Spesies Name of Species	Nama Lokal Local Name	Keterangan Description	Status Konversi Conservation Status
Mamalia			
1. Presbytis melalophos	Kera Hitam/Lutung	Bertengger/melompat Perch/jump	DL
2. Presbytis melalophos alba	Kera Hecil/Simpai	Bertengger/melompat Perch/jump	DL
Aves			
1. Falco subbuteo	Alap-alap Walet	Terbang Fly	DL
2. Falco cenchroides	Alap-alap Layang	Bertengger Perch	DL
3. Halcyon smyrnensis	Cekakak Belukar	Bertengger Perch	DL
4. Todirhamphus chloris	Cekakak Sungai	Bertengger Perch	DL
5. Halcyon pileata	Cekakak Cina	Bertengger Perch	DL
6. Accipiter virgatus	Elang Alap Besar	Bertengger/terbang Perch/fly	DL
7. Macheiramphus alcinus	Elang kelelawar	Terbang Fly	DL
Catatan Notes:			
<ul style="list-style-type: none"> DL = Dilindungi berdasarkan PP 7 tahun 1999 tentang Keaneekaragaman Hayati. DL = Protected based on the Government Regulation No. 7 Year 1999 on Biodiversity. Sumber: Data Pengawasan Lingkungan Desember 2013. Source: Environmental Supervisory Monitoring Data December 2013. 			

(sumber : Sustainability Report PTBA 2013)

Aspek yang kelima dalam kategori lingkungan adalah aspek Emisi. Dalam aspek ini, PTBA mencantumkan 4 tabel sekaligus melengkapi persyaratan standar pengungkapan CSR perusahaan. Tabel yang dimaksud antara lain tabel yang menunjukkan besarnya emisi udara, efek gas rumah

kaca, intensitas emisi gas rumah kaca serta pengurangan emisi gas rumah kaca. Keempat tabel digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.15
Emisi Udara

Emisi Udara					Air Emission	
ton					ton	
	Deskripsi	2013	2012	2011	2010	Description
UPTe	Partikulat	0.11	0.17	0.78	0.24	Particle
	SO ₂	0.98	1.20	5.20	0.44	SO ₂
	NO ₂	0.72	1.57	4.47	0.34	NO ₂
	H ₂ S	0.007756	0.000008	0.002183	0.0209	H ₂ S
	CO ₂	451,331	163,832	165,593	180,208	CO ₂
						TEMU

Catatan Note:
Dihitung berdasarkan PERMENLH 21/2008, lampiran VII, Perhitungan beban emisi dari hasil pengukuran manual.
Calculated based on the regulation PERMENLH 21/2008, attachment VII, calculation of emissions through manual measurement.

(sumber : Sustainability Report PTBA 2013)

Tabel Emisi Udara menjelaskan terjadinya penurunan emisi udara dari tahun 2012 ke tahun 2013. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada tabel efek gas rumah kaca berikutnya. Dalam tabel tersebut, justru terjadi peningkatan efek gas rumah kaca dari tahun 2012 ke tahun 2013.

Tabel 4.16
Efek Gas Rumah Kaca

Efek Gas Rumah Kaca					Greenhouse Gases	
ton CO ₂ e					ton CO ₂ e	
	Sumber Gas Rumah Kaca	2013	2012	2011	2010	Source of Green House Gas
UP	Emisi Langsung (BBM)	418.960	133.160	132.254	137.796	Direct Emission (Fuel Oil)
	Emisi tidak langsung dari penggunaan energi (listrik)	32.371	30.672	33.339	42.412	Indirect Emission from the use of electricity
	Jumlah					Total

(sumber : Sustainability Report PTBA 2013)

Tabel selanjutnya adalah tabel intensitas gas rumah kaca. Pada tabel ini pun terjadi peningkatan gas rumah kaca dari tahun 2012 ke tahun 2013.

Tabel 4.17
Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca				Intensity of Greenhouse Gas	
Unit	2013	2012	2011	2010	Unit
UP	0,0322	0,0125	0,0134	0,0166	MU

(sumber : *Sustainability Report PTBA 2013*)

Jika dilihat bagaimana pencapaian gas rumah kaca, dibandingkan tahun 2012. Banyak pencapaian yang dicapai di tahun 2013 seperti diantaranya penyerapan oleh tanaman, emisi dari freon yang meningkat drastis, lalu emisi dari penggunaan listrik, dan penggunaan energi terbarukan daripada BBM.

Tabel 4.18
Capaian Pengurangan Gas Rumah Kaca

Capaian Pengurangan GRK				Reduction of Greenhouse Gas			
ton CO ₂ e, telah diverifikasi AAI, 2013				ton CO ₂ e, verified by AAI, 2013			
Upaya	Sumber Gas Rumah Kaca	2013	2012	2011	2010	Source of Green House Gas	Effort
Revegetasi ^{*)}	Penyerapan oleh Tanaman	425	820	1.175	664	Absorption by Plants	Revegetation ^{*)}
Retrofit Mesin Pendingin ^{**)}	Emisi dari Freon	3.127	158	-	-	Emission from Freon	Coolant Machine Retrofit ^{**)}
Konservasi Energi PLTS ^{***)}	Emisi dari Penggunaan Listrik	1,83	-	-	-	Emission from the usage of Electricity	Energy Conservation Solar Power Plant (SPP) ^{***)}
Operasi PLTMH Desa Pelakat ^{***)}	Additionalitas Penggunaan Energi Terbarukan vs BBM	183,71	-	-	-	Additions from the use of Renewable Energy vs. Fuel Oil	Micro Hydro Power Plant Operation in the Village of Pelakat ^{***)}
Jumlah						Total	

Catatan Notes:
^{*)} Penelitian Penyerapan Biomassa PTBA oleh IPB, 2012. Potensi serap: 10,83 ton/ha. PTBA Biomass Absorption Research by IPB, 2012. Potential of Absorption: 10.83 ton/ha.
^{**)} Pedoman Inventaris GRK Nasional-KLH 2012 dan IPCC 2006, GWP CFC-12 = 7.300, GWP Musicool = 0. National GHG Inventory -KLH 2012 and IPCC 2006, GWP CFC-12 = 7.300, GWP Musicool = 0.
^{***)} Perhitungan Emisi GRK PTBA, 2013. Faktor Emisi Garis Dasar = 0,749 kgCO₂e/kWh (DJKE, 2012), Faktor Emisi PLTS = 0 kgCO₂e/kWh, Faktor Emisi PLTMH = 0 kgCO₂e/kWh. Calculation of PTBA GHG Emission, 2013. Baseline Emission Factor = 0.749 kgCO₂e/kWh (DJKE, 2012), Emission Factor SPP = 0 kgCO₂e/kWh, Faktor Emisi MHP = 0 kgCO₂e/kWh.

(sumber : *Sustainability Report PTBA 2013*)

PTBA dalam mengelola limbahnya dengan beberapa upaya produksi bersih, yaitu dengan Reduce (Mengurangi), Reuse (Mengggunakan Kembali), dan Recycle (Mendaur Ulang). Limbah B3 utama yang ditimbulkan dalam kegiatan PTBA adalah oli bekas yang berasal dari alat-alat operasi. Dalam *Sustainability report* PTBA tahun 2013, PTBA mengungkapkan tabel yang berisikan limbah perusahaan berdasarkan jenisnya (padat dan cair) beserta jenis limbah, perkembangan tiap tahun dan pengelolaan atas limbah tersebut. sebagai contoh untuk limbah utama PTBA, oli bekas dikelola dengan cara diserahkan kepada pengumpul berizin, *refining* dan *reuse* untuk campuran ANFO. Upaya lainnya yang dilakukan oleh PTBA dalam mengelola B3 adalah *Refinery* pelumas, pengurangan pemakaian Freon R-22 dan penggunaan campuran ANFO.

Aspek selanjutnya adalah aspek kepatuhan. Dari tabel kesimpulan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terdapat dalam SR PTBA tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa perusahaan termasuk karyawan di dalamnya semakin menyadari dampak positif dari setiap kegiatan pelestarian lingkungan yang dilakukan. Dimulai dari area pemantauan baku mutu lingkungan, PTBA dinilai telah memenuhi seluruh indikator yang diukur sesuai ketentuan Baku Mutu Lingkungan. Dari area pemantauan keanekaragaman hayati, di sekitar lokasi perusahaan, lahan-lahan telah direhabilitasi dan direvegetasi untuk mendukung kehidupan satwa liar. Selanjutnya, revegetasi telah dilakukan dengan kegiatan penanaman, namun kegiatan perawatan perlu semakin ditingkatkan kembali. Yang terakhir



adalah area pemantauan sosial ekonomi budaya, dijelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap kegiatan PTBA dinilai sangat baik dan masyarakat mendukung penuh kegiatan pertambangan yang dilakukan.

Terdapat 5 aspek dari kategori lingkungan yang tidak diungkapkan oleh PTBA, diantaranya aspek produk dan jasa, aspek transportasi, aspek lain-lain, aspek asesmen pemasok atas lingkungan dan aspek mekanisme pengaduan masalah lingkungan. Kelima aspek ini juga merupakan hal yang penting untuk diungkapkan terkait dengan persoalan lingkungan yang menjadi sorotan utama atas operasional perusahaan pertambangan.

4.3.2.3 Kategori Sosial

Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja

Dalam aspek pekerjaan, total dan tingkat perekrutan karyawan baru selama tahun 2013 mencapai kurang lebih 64.000 orang dari tahapan proses seleksi. Pada akhirnya, total karyawan baru yang tersebar dari jenjang SLTA hingga Strata-2 berjumlah 305 orang. Sedangkan untuk tingkat pergantian (*turn-over*), tercatat hanya 141 pegawai PTBA yang berhenti atau mencapai 4,5% dari total pegawai PTBA akhir tahun yang mencapai 3.115 pegawai. 125 orang berhenti karena faktor alami (pensiun), 14 orang karena meninggal dunia dan 2 orang karena permintaan sendiri.

Kesehatan dan keselamatan Kerja pada PTBA menjadi salah satu perhatian penting perusahaan. Perlu diketahui, PTBA adalah satu-satunya perusahaan tambang batubara di Indonesia yang memiliki sarana kesehatan

Rumah Sakit Bukit Asam di Tanjung Enim. Sama halnya dengan Indo Tambangraya Megah Tbk, PTBA juga memiliki Departemen K3L tersendiri yang menjalankan fungsi perencanaan strategis dan koordinasi serta bertanggung jawab langsung kepada General Manager UPTE. Pemeriksaan kesehatan dilakukan PTBA secara berkala kepada seluruh karyawan. Setidaknya, dalam kurun waktu satu tahun, karyawan PTBA memeriksakan kesehatannya selama bekerja. Pemeriksaan kesehatan khusus bagi karyawan menjelang purna karya atau karyawan yang pekerjaannya terpapar dengan risiko kesehatan menjadi tanggung jawab dari PTBA. Berikut adalah tabel tingkat kekerapan kecelakaan kerja yang terjadi di PTBA pada tahun 2013:

Tabel 4.19
Tingkat Kekerapan Kecelakaan Kerja

Tingkat Kekerapan Kecelakaan Kerja									Accident Incidence Levels
Jenis Insiden	2013		2012		2011		2010		Type of Incident
	L	P	L	P	L	P	L	P	
Kematian	0	0	0	0	2	0	1	0	Fatal
Tingkat Cedera	1,12 x 10 ⁻⁷		2,05 x 10 ⁻⁷		3,59 x 10 ⁻⁷		3,28 x 10 ⁻⁷		Injury Rate
Hari Hilang	0,000002		0,000003		0,000723		0,000408		Loss Day Rate
Tingkat Ketidakhadiran	0,28%		0,25%		0,31%		0,29%		Absentee Rate

(sumber : *Sustainability Report PTBA 2013*)

Aspek selanjutnya adalah aspek pelatihan dan pendidikan. PTBA memiliki beberapa program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan pada tahun 2013, diantaranya:

- a. Peningkatan kompetensi manajerial pegawai melalui program pengembaran manajemen.
- b. Peningkatan kompetensi teknis pegawai melalui pelatihan teknik.

c. Pelaksanaan Uji Kompetensi teknis dilakukan terhadap pegawai dengan jenjang jabatan IV sampai VI dengan metode *behavioral event interview* dan praktik.

d. Uji kompetensi non teknis menggunakan metode *assessment center*.

Rata-rata jam pelatihan per Tahun per pekerja 2013 digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.20
Rata-rata Jam Pelatihan PTBA 2013

Rata-rata Jam Pelatihan per Tahun per Pekerja 2013				Average Number of Training Hours of Each Employee in 2013	
Jenil Pelatihan	Internal	External	Grand Total	Total Jam Pelatihan Total Training Hours	Type of Training
Teknis	2.925	1.333	4.253	162.528	Technical
Manajemen	1.342	66	1.408	18.952	Managerial
Grand Total	4.267	1.394	5.661	181.480	Grand Total
Total Jam Pelatihan	107.664	73.816	181.480		Total Training Hours
Rata-rata Pelatihan Tiap Pegawai				58	Average Number of Training Hours of Each Employee
Tugas Belajar		5	5	-	Study

(sumber : *Sustainability Report PTBA 2013*)

Sedangkan untuk persentase jumlah pegawai yang menerima penilaian kerja, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21
Persentase Jumlah Pegawai Menerima Review Kinerja

Persentase Jumlah Pegawai yang Menerima Penilaian Kinerja				The Number of Employees with Performance Appraisal	
Bentuk Akhir Penilaian	2013	2012	2011	2010	Final Form of Assessment
Promosi	105	336	110	45	Promotion
Demosi	0	0	0	0	Demotion
Mutasi/Rotasi	371	1.201	520	479	Mutation/Rotation
Persentase terhadap jumlah total pegawai	15,28%				Percentage to the total employees

(sumber : *Sustainability Report PTBA 2013*)



Aspek selanjutnya adalah aspek kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki. PTBA menegaskan bahwa pemberlakuan standar upah atau gaji semata-mata terjadi atas dasar perubahan prestasi pegawai, jenjang jabatan, masa kerja serta kinerja individu. Tidak ada faktor gender dalam menentukan besarnya upah atau gaji seseorang.

Dalam kategori praktek ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, terdapat 4 aspek yang tidak diungkapkan oleh PTBA, diantaranya hubungan industrial, keberagaman dan kesetaraan peluang, asesmen pemasok atas praktek ketenagakerjaan dan mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan.

Hak Asasi Manusia

Aspek pertama yang akan dibahas adalah aspek investasi. PTBA memang melaksanakan pelatihan seperti yang dibahas sebelumnya. Akan tetapi dalam program pelatihan yang dijabarkan dalam *sustainability report* tahun 2013, PTBA tidak menjelaskan adanya pelatihan karyawan tentang kebijakan hak asasi manusia melainkan PTBA mengadakan pelatihan dan pembekalan pengetahuan akan HAM kepada pegawai yang bertugas sebagai satuan pengamanan (satpam). Begitu pula dengan aspek non-diskriminasi. PTBA tidak mengungkapkan ada atau tidaknya kejadian diskriminasi termasuk tindakan korektif yang diambil.

Dalam hal pekerja anak, pekerja paksa atau wajib kerja. PTBA menaruh perhatian besar pada upaya pencegahan adanya eksploitasi anak. Syarat usia minimum untuk menjadi calon pegawai di PTBA adalah 18 tahun. Persyaratan



ini juga diberlakukan bagi calon mitra kontraktor pertambangan. PTBA juga memberlakukan jam kerja yang terdiri dari 2 hingga 3 kali pergantian (*shift*). Pemberlakuan jam kerja ini untuk menghindari jam kerja yang tidak wajar atau dikategorikan ke dalam pekerja paksa.

Selain itu, dalam bagian HAM ini, PTBA juga terus memelihara rasa saling menghormati adat dan budaya lokal dimana wilayah perusahaan berada dan beroperasi. Selama periode pelaporan, belum pernah ditemukan adanya masalah atau kekerasan yang dilakukan antara pihak PTBA dengan pihak masyarakat sekitar wilayah operasi pertambangan.

Masyarakat

Aspek yang pertama berkaitan dengan masyarakat lokal, dalam hal penilaian dampak lingkungan, terdapat keluhan akan keruhnya air Sungai Enim dan Sungai Lematang. Akan tetapi, pencemaran air tersebut bukan berasal dari aktivitas PTBA melainkan perusahaan diluar PTBA. Dalam keterlibatan masyarakat, PTBA memiliki model kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Partisipatif
- b. Keberlanjutan
- c. Kolaborasi
- d. Transparansi dan Akuntabel
- e. Kesetaraan dan Keadilan Gender
- f. Demokratis



Selama tahun 2013, tercatat 1 dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional PTBA, yaitu polusi suara dari pengoperasian alat-alat berat yang mengganggu kegiatan masyarakat sekitar Muara Enim. Tindakan yang diambil oleh PTBA salah satunya adalah pemasangan alat peredam berupa karet pada alat berat serta penanaman pohon dengan jarak rapat untuk membantu meredam suara sekaligus mengurangi intensitas debu memasuki kawasan pemukiman.

Aspek masyarakat yang tidak diungkapkan dalam *Sustainability Report* antara lain anti korupsi, kebijakan publik, anti persaingan, kepatuhan, asesmen pemasok atas dampak terhadap masyarakat, dan mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat.

Tanggung Jawab Produk

PTBA menetapkan standar keamanan dan kesehatan dalam rangka mengurangi gangguan kesehatan bagi operator maupun masyarakat sekitar. Langkah PTBA dalam hal ini misalnya jarak areal pemuatan dengan pemukiman terdekat diatur terstandar; besaran butiran batu bara diatur secara berjenjang selama proses angkut agar mengurangi jumlah debu halus yang terbawa angin, dan sepanjang jalur transportasi di kawasan tambang, dilakukan penyemprotan dengan air secara reguler untuk mengurangi dampak debu yang beterbangan.

Untuk produk tertentu seperti briket, PTBA membagi kedalam beberapa standar ukuran berat maksimum, yaitu 12 kg dan 20 kg. Kemasan 20kg



untuk tipe telur, sedangkan 12 kg untuk tipe kubus. Hal ini dilakukan mengingat evaluasi kesehatan dalam proses pengangkutan briket.

Selama tahun 2013, tidak ada keluhan yang terbukti terkait dengan ketidakpatuhan PTBA akan peraturan dan juga keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan. Setiap permintaan konsumen selalu dispesifikasikan oleh PTBA demi kualitas terbaik yang dihasilkan untuk konsumen. PTBA pun melakukan rapat koordinasi setiap bulannya untuk membahas kinerja *supply chain*, kepuasan konsumen, target kualitas dan sebagainya. PTBA membuka saluran telepon, *email* maupun surat kepada pelanggan dalam rangka memprioritaskan prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam memberikan layanan kepada konsumen.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan Pedoman GCG

Pada umumnya, tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh Indo Tambangraya Megah (ITM) dan Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) tahun 2013 dapat dinyatakan sudah berjalan dengan baik. Dari prinsip dasar pertama yakni transparansi, kedua perusahaan telah mengungkapkan kinerjanya baik itu kinerja manajemen maupun kinerja keuangan dalam bentuk laporan tahunan yang telah di audit. Hal ini menggambarkan bahwa ITM dan PTBA berusaha setransparan mungkin dalam mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kewajibannya.

Prinsip dasar yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri sudah menjadi yang sangat erat kaitannya dengan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Akuntabilitas menyajikan data dari kedua perusahaan mengenai struktur organisasi berdasarkan bagian bagian yang ada dalam perusahaan seperti rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, sekretaris perusahaan, komite tata kelola, remunerasi, dan sebagainya. Kedua perusahaan baik itu ITM maupun PTBA telah mengungkapkan bentuk perwujudan akuntabilitas mereka dalam laporan tata kelola yang terdapat dalam laporan tahunan 2013.



Prinsip dasar yang ketiga adalah responsibilitas. Tanggung jawab disini tidak hanya membahas tanggung jawab perusahaan untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja bagi internal-nya melainkan partisipasi perusahaan untuk turut mensejahterakan eksternal-nya terlebih masyarakat yang terkena dampak langsung di sekitar wilayah operasional perusahaan. ITM dan PTBA telah menerbitkan *sustainability report* tahun 2013 milik mereka masing-masing. Di dalam *sustainability report* ,ITM dan PTBA membahas berbagai kegiatan yang mereka kerjakan baik itu dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Prinsip dasar yang ke empat adalah independensi. Di dalam beberapa bagian dalam perusahaan, ITM dan PTBA menghindari adanya benturan kepentingan atau dominasi dari pihak manapun dengan cara memilih orang-orang yang terbebas dari afiliasi atau tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham maupun hubungan keluarga dengan pemilik perusahaan. Independensi yang disyaratkan Pedoman GCG setidaknya harus melebihi 20% dari total dewan komisaris, dewan direksi atau komite audit. Jika mengikut dari persentase yang telah ditetapkan, komposisi yang terdapat dalam ITM dan PTBA telah melampaui 20% persyaratan.

Prinsip dasar GCG yang terakhir adalah kewajaran. Kewajaran dalam hal ini memberi arti tidak adanya ketimpangan dalam perlakuan perusahaan terhadap pemangku kepentingan. ITM dan PTBA memiliki aturan tersendiri dalam pelaksanaan pemberian masukan dan aturan dalam *voting*. Pemegang saham minoritas tetap diberi kesempatan namun dengan cara tersendiri. Dalam hal kesempatan bekerja, kedua perusahaan baik ITM maupun PTBA tidak



memandang gender sebagai faktor utama pembedaan, yang membedakan dalam peningkatan gaji atau promosi jabatan adalah prestasi kerja. Setiap karyawan diberi hak yang sama atas fasilitas, pemberian masukan, dan penerimaan pelatihan dari perusahaan.

Dapat disimpulkan, dari laporan tata kelola perusahaan yang terdapat dalam laporan tahunan. ITM dan PTBA telah melakukan tata kelola perusahaan dengan baik. Seluruh komponen perusahaan perlu untuk bersinergi dan saling berintegrasi untuk mencapai perusahaan yang bersih dan berintegritas yang disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG).

5.1.2 Pengungkapan *Sustainability Report* berdasarkan GRI G4

Pengungkapan CSR diambil dari *sustainability report* ITM dan PTBA yang dipublikasikan melalui *website* masing-masing perusahaan. Pengungkapan CSR yang dibahas dalam penelitian ini adalah 3 kategori yang menjadi bagian dari aspek material perusahaan seperti kategori ekonomi, kategori lingkungan dan kategori sosial.

Kategori ekonomi terdiri dari 4 aspek dan 9 indikator kinerja. Dari ke 9 indikator kinerja dapat dilihat bahwa baik ITM dan PTBA memenuhi 50% dari keseluruhan indikator. Masih ada 50% indikator yang belum dipenuhi oleh perusahaan dikarenakan memang tidak diungkapkan, tidak dilaksanakan ataupun perusahaan tidak mengerjakan hal tersebut dalam operasionalnya.

Kategori lingkungan terdiri dari 12 aspek dan 34 indikator kinerja. ITM berhasil memenuhi 12 sedangkan PTBA mengungkapkan lebih banyak 1



indikator yakni 13 indikator. Kedua perusahaan ini tidak mengungkapkan keseluruhan indikator yang sebenarnya jika diungkapkan akan sangat memberi gambaran bagaimana kedua perusahaan tersebut beroperasi dan dampaknya pada lingkungan.

Kategori sosial terdiri dari 4 bagian yaitu praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk. Praktek ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja terdiri dari 8 aspek dan 16 indikator kinerja. ITM dan PTBA berhasil memenuhi 6 kategori yang beberapa diantaranya dalam pemenuhan indikator yang berbeda. Hak asasi manusia terdiri dari 10 aspek dengan 12 indikator kinerja di dalamnya. PTBA mengungkapkan 7 indikator kinerja sedangkan ITM sama sekali tidak mengungkapkan apapun dalam bagian Hak Asasi Manusia. Bagian masyarakat terdiri dari 7 aspek dan 11 indikator kinerja. ITM hanya mengungkapkan 1 indikator kinerja dan PTBA hanya 2 indikator kinerja. Sebenarnya terdapat beberapa indikator yang diungkapkan PTBA, hanya saja setelah ditelusuri di laporan, tidak terdapat pernyataan atas pengungkapan CSR di indikator tertentu. Bagian terakhir adalah tanggung jawab produk. Tanggung jawab produk terdiri dari 5 aspek dan 9 indikator kinerja. ITM mengungkapkan 2 indikator sedangkan PTBA lebih banyak 4 indikator yakni 6 indikator.

Hal yang perlu ditingkatkan oleh ITM dan PTBA adalah penambahan indikator kinerja yang berhasil diungkapkan pada *sustainability report* di tahun mendatang. Masih banyak indikator yang memegang kunci informasi yang penting agar *stakeholders* mengetahui sejauh mana perusahaan berdampak baik

itu dampak positif maupun tindakan perusahaan meminimalisasi dampak negatifnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian kualitatif ini bersifat subjektif, analisis atas sumber data yang didapat dilihat dari sudut pandang penulis dan teori yang mendukung.
2. Beberapa indikator kinerja yang perusahaan cantumkan dalam indeks GRI perusahaan tidak selalu ada dalam laporan *sustainability report*nya.

5.3 Saran

Melalui penelitian ini penulis yang bermaksud untuk meneruskan penelitian atau melakukan penelitian sejenis dapat memperbaiki keterbatasan masalah, sehingga hasil yang didapat lebih sempurna dan komprehensif. Penulis selanjutnya dapat menganalisis tidak hanya bersumber pada laporan tahunan dan *sustainability report* perusahaan saja melainkan wawancara, observasi atau sumber berita dan sebagainya. Sehingga dapat diperbandingkan antara pengungkapan melalui laporan dan penerapan di lapangan.